



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERIKANAN  
TAHUN 2021 - 2026**



**DINAS PERIKANAN KABUPATEN TABANAN  
JALAN PULAU NIAS NOMOR 33 TELPON/FAX 0361- 811497  
T A B A N A N  
2022**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widi Wasa atas anugrah-Nya, kami dapat menyusun Revisi Rencana Startegis Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Dokumen Revisi Rencana Startegis adalah merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab. III Pasal 7.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, maka sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab V, Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rancangan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana.

Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Tabanan telah menyusun revisi Renstra (Rencana Strategis) sesuai dengan dinamisasi pembangunan dan tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis, sesuai dengan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan.

Kesempatan yang baik ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu penyusunan revisi rencana strategis ini. Mudah-mudahan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan pembangunan Tahun 2021-2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabanan, 27 Juli 2022

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Tabanan



IMADE YUDIANA, ST., M.T

Pembina Utama Muda

NIP. 19690619 199803 1 005



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN</b> .....	14
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	14
2.2 Sumber Daya pada Dinas Perikanan.....	20
2.2.1 Sumber Daya Aparatur .....	20
2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana Dinas pada Perikanan .....	21
2.2.3 Sumber Daya Pelaku Utama Perikanan.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH</b> .....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	34
3.2 Telaahan Terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah/WKDH.....	39
3.3 Telaahan Renstra Kementerian, Provinsi dan Kabupaten.....	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	45
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	45
3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	47
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis pada Dinas Perikanan.....	55
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	60
4.1 Tujuan .....	60
4.2 Sasaran .....	63



<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBJAKAN.....</b>	<b>67</b>
5.1 Strategi.....	67
5.2 Arah Kebijakan .....	67
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>71</b>
6.1 Program.....	71
6.2 Kegiatan .....	73
6.3 Kegiatan dan Kelompok Sasaran .....	75
6.4 Pendanaan Indikatif .....	76
<b>BAB VII KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>85</b>
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	85
7.2 Indikator Kinerja Daerah .....	86
7.3 Indikator Kinerja Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan.....	87
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Eselon Periode 1 Januari 2022.....	20
Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan dan Agama .....	21
Tabel 2. 3 Jumlah Aparatur Periode 2016-2021 .....	21
Tabel 2. 4 Sumber Daya Pelaku Perikanan .....	22
Tabel 2. 5 Produksi Benih Ikan .....	25
Tabel 2. 6 Produksi Ikan Konsumsi Air Tawar .....	26
Tabel 2. 7 Hasil Tangkapan Ikan di Laut Dan Perairan Umum .....	26
Tabel 2. 8 Produk Olahan Hasil Perikanan.....	27
Tabel 2. 9 Keragaan Pokmaswas Produktif.....	28
Tabel 2. 10 Peningkatan SDM Pelaku Perikanan.....	29
Tabel 2. 11 Perkembangan Anggaran Dinas .....	30
Tabel 2. 12 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan .....	31
Tabel 2. 13 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	32
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	35
Tabel 3. 2 Dasar Hukum Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW.....	45
Tabel 3. 3 Telaah RTRW.....	46
Tabel 3. 4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	47
Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan PD.....	62
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama.....	64
Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	68
Tabel 6. 1 Program dan Kegiatan .....	73
Tabel 6. 2 Rencana Kegiatan dan Kelompok Sasaran.....	75
Tabel 6. 3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	77
Tabel 7. 1 IKU Perangkat Daerah .....	85
Tabel 7. 2 IKU Daerah .....	87
Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah .....	88



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	5
Gambar 4. 1 Alur Pikir Perencanaan .....	60



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinamika pembangunan di era MEA saat ini menuntut perencanaan pembangunan daerah kabupaten seharusnya mengacu pada perencanaan pembangunan tingkat nasional dan provinsi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dinamika globalisasi dan tuntutan tatanan kehidupan baru mendorong semua stakeholder berpikir visioner dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan nasional secara terus menerus mengalami penyempurnaan, sehingga RPJMP tahun 2019-2024 harus diaktualisasikan secara sinergis dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Integrasi pembangunan tersebut mendorong daerah terus berinovasi, kreatif, dan partisipatif dalam menggali potensi sumberdaya yang dimiliki untuk menggerakkan roda pembangunan di daerahnya. Tuntutan akan pelayanan publik juga mendorong aparatur meningkatkan standar pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga optimalisasi pembangunan dapat diwujudkan.

Peta birokrasi di Indonesia kini dipaksa untuk digeser agar berjalan sesuai dengan pakemnya. Pemerintah berupaya merumuskan sebuah peraturan agar menjadi landasan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, dimana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan.

Letak wilayah Kabupaten Tabanan cukup strategis karena berdekatan dengan Ibukota Propinsi Bali yang hanya berjarak sekitar 25 km dengan waktu tempuh  $\pm$  45 menit dan dilalui oleh jalur arteri yaitu jalur antar provinsi. Kabupaten Tabanan terletak di bagian selatan pulau Bali yang secara geografis berada pada posisi 8014' 30'' - 80 30' 07'' Lintang Selatan, 1140 54' 52'' - 1150 12' 57'' Bujur Timur. Kabupaten Tabanan yang memiliki luas daratan/luas wilayah keseluruhan kurang lebih 839,33 km<sup>2</sup> atau



kurang lebih 14,90 % dari luas Pulau Bali (5.632, 85 km<sup>2</sup>), dengan garis pantai sepanjang 35 km yang terbentang dari Timur (Pantai Nyanyi) kecamatan Kediri ke Barat (Pantai Selabih) kecamatan Selemadeg Barat, dengan luas perairan kurang lebih 259,28 Km (4 mil) dari garis pantai yang merupakan wilayah laut Kabupaten Tabanan yang diwilayahi oleh 6 kecamatan yaitu Kecamatan Kediri, Tabanan, Kerambitan dan Selemadeg Timur, Selemadeg dan Selemadeg Barat.

Kabupaten Tabanan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Bali memiliki *local genius* budaya yang mengakar dan terwujud sebagai *living culture* masyarakat Bali pada umumnya. Secara umum *local genius* budaya masyarakat Bali mengakar dari budaya agraris. Kabupaten Tabanan tetap konsisten mengambil langkah-langkah pembangunan yang dijiwai oleh *local genius* budaya Bali tersebut, yang dituangkan dalam setiap dokumen dan implementasi pembangunan daerah.

Pembangunan bidang urusan pangan dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berpedoman pada Permen/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Tabanan sampai saat ini telah dapat dikatakan cukup berhasil yang terindikasi dari tidak adanya daerah rawan pangan. Sebagai daerah agraris, Tabanan masih merupakan sentra produksi padi, palawija, ternak, dan ikan.

Pantai di wilayah Tabanan memiliki ekosistem yang khas yang juga memiliki keunikan sumber daya alam sehingga keberadaan pantai merupakan potensi pembangunan ekonomi untuk dimanfaatkan. Jasa-jasa lingkungan pantai meskipun sudah dimanfaatkan untuk layanan wisata, niaga dan perikanan, tetapi masih banyak yang belum dikelola dengan baik. Pengelolaan ini semestinya diarahkan untuk meningkatkan daya gunanya tanpa mengabaikan kelestarian.

Keberadaan sumberdaya perikanan yang cukup besar tersebut adalah merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila peluang dan prospek yang terbuka dalam pengembangan agribisnis perikanan di Kabupaten Tabanan akan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan permasalahan yang masih dihadapi dapat diatasi secara



bertahap, maka bukan suatu pilihan yang salah jika bidang perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi pangan dimasa depan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berjangka, yang meliputi:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RJPMMD) Semesta Berencana untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana dan memperhatikan RPJPMN. Rencana Kerja pembangunan daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 sangat didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 dan arah kebijakan pimpinan daerah yang baru terpilih tentang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) Semesta Berencana Tahun 2021-2026, maka Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan menyusun rancangan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran teknis sesuai kewenangan di urusan kelautan dan perikanan untuk penjabaran visi dan misi pimpinan daerah yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan daerah jangka menengah.

Revisi dokumen jangka menengah yaitu Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan ini penting karena dalam masa lima tahun, perangkat daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai perencanaan ini. Selain itu urgensi revisi rencana strategis ini adalah :

- a. Acuan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahunan sehingga perencanaan menjadi lebih terarah.

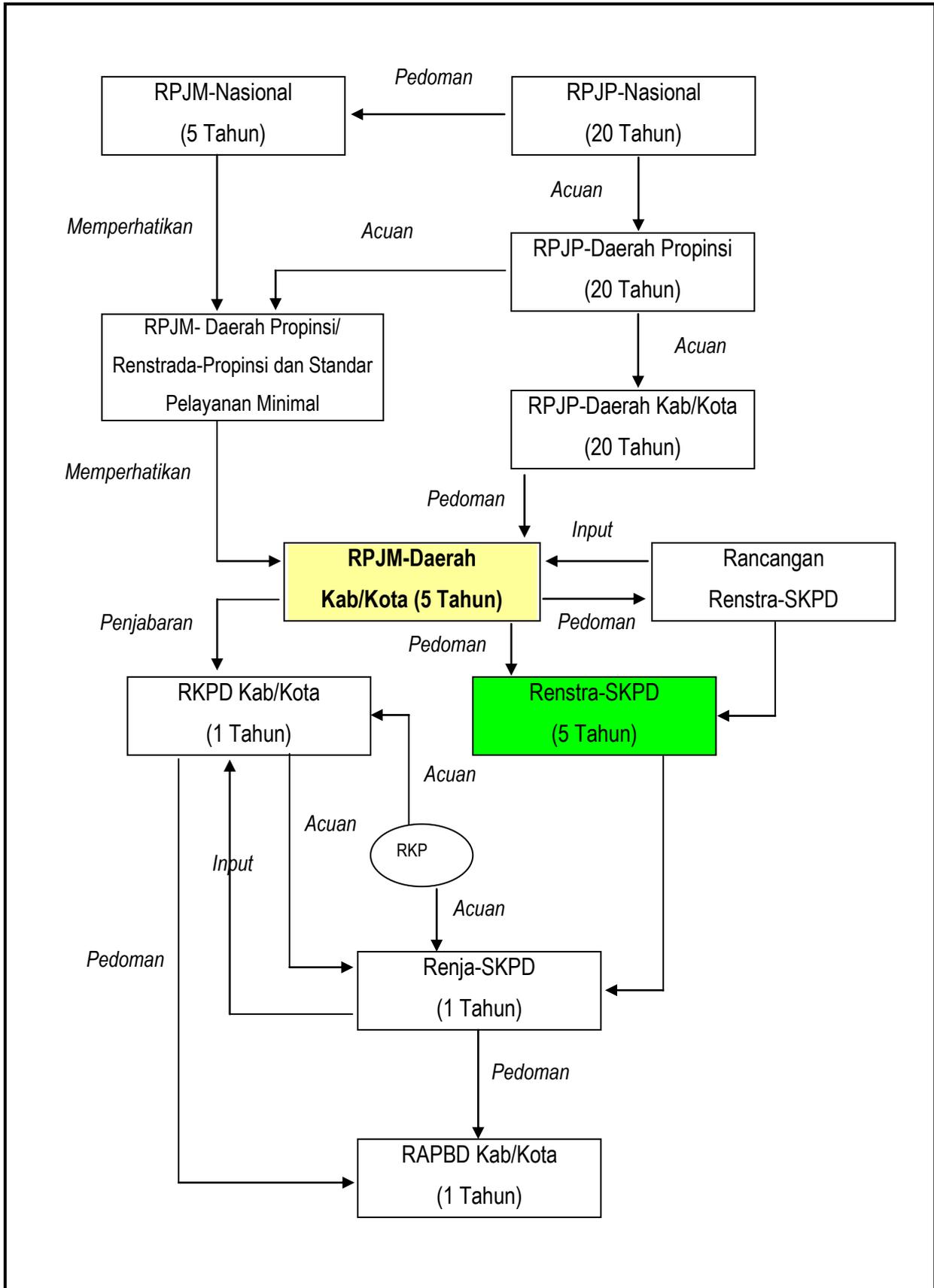


- b. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- c. Terjaminnya sinergisitas, sinkronisasi, dan integritas Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Semesta Berencana Tahun 2021-2026.

Bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif, dan tetap fokus pada pemecahan masalah mendasar yang dihadapi Kabupaten Tabanan khususnya urusan kelautan dan perikanan. Proses penyusunan rancangan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan melalui beberapa tahapan yaitu: 1). Penjaringan aspirasi dan usulan masyarakat di masing-masing kecamatan, 2). Fokus group diskusi maupun forum perangkat daerah, 3). Kajian partisipatif, teknokratik, dan politis atas perencanaan pembanunan jangka menengah. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sedangkan program, kegiatan, dan sub kegiatan telah diatur dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Dinamisasi aturan perencanaan sesuai Kepmendagri Nomor 050 tahun 2021 juga telah menetapkan indiator dan satuannya sehingga perangkat daerah lebih terarah dalam menyusun tolok ukur kinerja tahunannya.

Penyusunan rancangan dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan didasarkan pada indikator:

- a. Hasil (*outcome*) yaitu bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
- b. Keluaran (*output*) yaitu bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Masukan (*input*) yaitu bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan seperti dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagaimana yang digunakan.



Gambar 1. 1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dari uraian diatas, maka Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan berfungsi sebagai:

- a. Pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran (RKA) tahunan Dinas Perikanan.
- b. Pedoman penyusunan laporan pertanggungjawaban perangkat daerah.
- c. Alat ukur kinerja pembangunan perikanan.

## 1.2 Landasan Hukum

Dalam masa lima tahun, Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (renja) yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Landasan hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan didasari oleh ketentuan sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil, yaitu Pancasila
- b. Landasan konstituional, yaitu Undang –Undang Dasar 1945
- c. Landasan Operasional antara lain:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan



Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan ini adalah :



- a. Mengoptimalkan peran Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan perikanan.
- b. Meningkatkan peran *stakeholders* dan komponen masyarakat untuk berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang *good and clean governance*.
- c. Arah pembangunan untuk lima tahun kedepan dalam pencapaian visi, misi, dan program.
- d. Tolok ukur pertanggungjawaban Kepala SKPD pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan adalah sebagai acuan dalam :

- a. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja),
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- c. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan pembangunan urusan kelautan dan perikanan selama lima tahun.
- d. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan LPPD.
- e. Tata kelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) maka kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Pada bab ini berisi tentang latar belakang yang menguraikan secara ringkas: mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD SB, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/ kota dan dengan Renja PD.



- 1.2 Landasan Hukum memuat : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.
- 1.4 Sitematika Penulisan Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumberdaya perangkat daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja pelayanan PD memuat tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan PD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai



tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD memuat permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra memuat faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/Kabupaten/kota.
- 3.4 Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis : pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari: gambaran pelayanan



PD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra PD, implikasi RTRW bagi pelayanan PD dan implikasi KLHS bagi pelayanan PD.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD.

#### **BAB V STRTATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan srategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

#### **BAB VIII PENUTUP**

Menguraikan penutup rancangan Rencana Strategis OPD.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN**

Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan berada pada urusan pilihan kelautan dan perikanan. Untuk mengetahui profil layanan Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan, dapat dilihat dari struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, komposisi personalia, capaian kinerja sebelumnya, kondisi lingkungan strategis, dan isu-isu strategis.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Dinas Perikanan dan Kelautan berubah nomenklatur menjadi Dinas Perikanan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, maka tugas pokok Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan yang tercantum pada Bab VI Pasal 21 adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kelautan dan perikanan.

Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi satu Sekretariat, tiga Bidang, dan satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Produksi Perikanan Budidaya. Struktur organisasi seperti pada lampiran 1.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sesuai Bab VI Pasal 14, Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, dimana masing-masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut:



- A. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan bertugas :
- a. Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;;
  - b. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan perikanan tangkap;
  - c. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan perikanan budidaya;
  - d. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - e. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - f. Monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas perikanan;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan;
  - h. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- B. Sekretaris Dinas bertugas :
- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas perikanan
  - b. Koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat
  - c. Koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan
  - d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah
  - e. Pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian
  - f. Koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
  - g. Koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi
  - h. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi
  - i. Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik
  - j. Koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah
  - k. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas perikanan; dan
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
- B.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan bertugas :
- a. Menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan



- b. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan)
- c. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor
- d. Melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur
- e. Menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi
- g. Menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah
- h. Melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat
- i. Menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas perikanan
- j. Menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan
- k. Melaksanakan penatausahaan keuangan
- l. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran
- m. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan
- n. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
- o. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

C. Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayanan bertugas :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pemberdayaan nelayan
- b. Penyusunan program kerja lingkup bidang pemberdayaan nelayan
- c. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
- d. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten;
- e. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- f. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten



- g. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
  - h. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
  - i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan nelayan; dan
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- D. Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan bertugas :
- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pemberdayaan pembudidaya ikan
  - b. Penyusunan program kerja lingkup bidang pemberdayaan pembudidaya ikan
  - c. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten
  - d. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil
  - e. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten
  - f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan
  - g. Pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten
  - h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan pembudidaya ikan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- E. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan bertugas :
- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pengkajian dan pengembangan
  - b. Penyusunan program kerja lingkup bidang pengkajian dan pengembangan



- c. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil
- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
- e. Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengkajian dan pengembangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Dinamika kelembagaan, sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Produksi Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan, pada Pasal 6 menyatakan:

1. Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya
  - a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan UPTD Produksi Perikanan Budidaya;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan UPTD Produksi Perikanan Budidaya bersama instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi tugas;
  - c. Melaksanakan kegiatan perbenihan ikan, pembesaran, dan pemasaran ikan;
  - d. Menyelenggarakan kegiatan inovasi teknologi pembenihan, penyediaan calon induk unggul, dan pemacuan stock ikan di erairan umum;
  - e. Melaksanakan pendampingan teknologi kepada Unit Pembenihan Ikan Rakyat;
  - f. Membantu akses pemasaran produksi perikanan budidaya dan Unit Pembenihan Ikan Rakyat;
  - g. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis
  - h. Membina, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
  - i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  - j. Menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;



- k. Mengumpulkan dan mengolah data untuk pedoman kerja;
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
  - m. Membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
2. Pada Pasal 7, dinyatakan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Produksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan ketatausahaan UPTD berdasarkan dokumen rencana yang ada sebagai pedoman kerja;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis;
  - c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
  - e. Menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
  - f. Mengendalikan dan menganalisa kegiatan administrasi Tata Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. Melaksanakan urusan administrasi dan surat menyurat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pada Dinas Perikanan dalam melaksanakan urusan kelautan dan perikanan berkoordinasi dengan Penyuluh Perikanan yang status kepegawaian sebagai pegawai pusat. Adapun Penyuluh Perikanan mempunyai tugas :

- a. Mengidentifikasi potensi wilayah, ekosistem perairan, kebutuhan teknologi, pelaku utama, dan pelaku usaha bidang perikanan
- b. Merencanakan penyuluhan perikanan
- c. Menyusun materi dan metode penyuluhan perikanan
- d. Menetapkan materi dan metode penyuluhan perikanan
- e. Mengembangkan swadaya dan mengembangkan laboratorium/ klinik penyuluhan perikanan swakarya pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan
- f. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penyuluhan perikanan



- g. Mengevaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan perikanan
- h. Mengevaluasi penyuluhan spesifik lokasi, yang terkait dengan kebijakan pembangunan perikanan
- i. Menyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan perikanan
- j. Merumuskan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan
- k. Mengembangkan metode/ Sistem Kerja Penyuluhan Perikanan
- l. Menyusunan karya tulis/ karya ilmiah di bidang perikanan
- m. Menterjemahkan/ penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan
- n. Membimbing penyuluh perikanan di bawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi

## 2.2 Sumber Daya pada Dinas Perikanan

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan, periode 1 Januari 2022 untuk PNS untuk pegawai pejabat struktural sebanyak 8 orang, pegawai pejabat fungsional sebanyak 10 orang, dan pegawai fungsional umum 21 orang, Data selengkapnya disajikan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Eselon Periode 1 Januari 2022

No	Jabatan	Eselon	Jumlah PNS
1	Kepala Dinas	II / b	1 orang
2	Sekretaris Dinas	III / a	1 orang
3	Kabid	III / b	3 orang
4	Kasubag	IV / a	1 orang
5	Ka UPTD	IV / a	1 orang
6	Kasubag TU UPTD	IV / b	1 orang
7	Pejabat Fungsional	-	10 orang
8	Fungsional Umum	II/a – III/d	21 orang
8	Tenaga Kontrak	-	33 orang

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perikanan, 2022

Aparatur di Dinas Perikanan telah dikelola sesuai dengan aturan kepegawain berlaku, adapun datanya disajikan seperti tabel di bawah ini:



Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan dan Agama

No	Uraian	Aparatur		
		Laki	Perempuan	Jumlah
1	Menurut jenis kelamin	39	33	72
2	Menurut pendidikan:			
	SD	0	0	0
	SMP	1	1	2
	SMA/SMK	11	12	23
	D-III	1	1	2
	D-1	0	2	2
	S-1	22	16	38
	S-2	4	1	5
3	Menurut agama:			
	Hindu	39	30	69
	Islam	2	0	2
	Kristen	0	1	1
	Budha	0	0	0

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perikanan, 2022

Aparatur di Dinas Perikanan yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat cukup dinamis. Berikut disajikan jumlah aparatur periode 2016-2020 seperti tabel berikut ini.

Tabel 2. 3 Jumlah Aparatur Periode 2016-2021

No	Uraian	Tahun/ Orang				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jenis kelamin:					
	Laki-laki	42	42	35	31	27
	Wanita	11	10	11	11	12
2	Kepangkatan/golongan:					
	IV	5	6	5	6	5
	III	37	35	34	29	28
	II	11	11	7	7	6
	I	0	0	0	0	0

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Perikanan, 2022

### 2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana Dinas pada Perikanan

Dinas Perikanan yang berlokasi di Jalan Pulau Nias No. 33 Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai dalam operasional pemerintahan dan pelayanan publik.



a. Prasarana

Dinas Perikanan telah tertib administrasi dalam pengelolaan asset tetap meliputi asset tanah, asset gedung dan bangunan, dan asset jalan, jaringan, dan irigasi yang tercatat di KIB A (tanah), KIB C (gedung dan bangunan), KIB D (jalan, jaringan, dan irigasi). Tanah kantor Dinas Perikanan telah bersertifikat dengan nomor hak pakai 00039. Gedung kantor tersebar di kantor dinas dan kantor UPTD produksi Perikanan Budidaya. Untuk kantor unit BBI Penebel, BBI Bolangan, BBI Meliling tersebut tanahnya masih hak pinjam pakai.

b. Sarana

Dinas Perikanan didukung oleh sarana operasional yang memadai yang sudah tercatat di KIB B (peralatan dan mesin) seperti sarana transportasi, sarana teknologi komunikasi, sarana teknologi informasi, dan lainnya.

**2.2.3 Sumber Daya Pelaku Utama Perikanan**

Sumber daya manusia yang merupakan *stakeholder* dan penggerak agribisnis dan roda ekonomi perikanan yaitu :

- a. Sektor hulu yaitu penyedia sarana produksi perikanan yang menyediakan input produksi yang sebarannya masih di pusat-pusat kota kabupaten dan kecamatan. Produsen atau penyedia benih ikan yang memproduksi dan menyediakan berbagai komoditas unggulan benih ikan yang tersebar di 10 kecamatan. Pembudidaya ikan yang mengembangkan komoditas rintisan dan unggulan daerah di berbagai usaha seperti kolam, sawah, saluran irigasi, dan keramba jarring apung. Usaha penangkapan ikan oleh nelayan di laut, sungai, dan danau.
- b. Sektor hilir yaitu pengolah hasil perikanan yang bahan bakunya disediakan oleh pembudidaya dan nelayan lokal maupun luar daerah untuk memproduksi produk bernilai tambah, dimana hasilnya dipasarkan oleh pedagang pengumpul dan pengecer di pasar tradisional, rumah makan, supermarket, hotel dan restoran. Selain pemasaran produk konsumsi juga pemasaran produk non konsumsi seperti tanaman hias air tawar, ikan hias, kerajinan kekerangan baik di pasar umum maupun pasar seni. Adapun datanya seperti di bawah ini:

Tabel 2. 4 Sumber Daya Pelaku Perikanan

No	Uraian	Pelaku usaha	Ket
----	--------	--------------	-----



		2017	2018	2019	2020	2021	
A	Pelaku agribisnis hulu:						
	Penyedia saprokan (pakan, obat, peralatan, pupuk)	13	13	13	13		Unit
	Panti benih ikan (BBI, RCP, KPI, UPR)	49	41	41	42		Unit
	Kelompok pembudidaya ikan	481	487	498	516		Klp
	Kelompok penangkap ikan	72	77	78	82		Klp
B	Pelaku agribisnis hilir:						
	Kelompok pengolah hasil perikanan	63	63	71	72		Klp
	Kelompok pengawas swakarsa masyarakat	11	11	11	11	11	Klp

Sumber: Data Kelembagaan Kelompok Perikanan, 2022

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupaya untuk memberikan pelayanan prima baik pelayanan bagi aparatur, instansi, dan masyarakat.

#### a. Kinerja Pelayanan pada Aparatur

Pelayanan aparatur diupayakan sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur. Adapun kinerja pelayanan yang dilakukan antara lain:

1. Pelayanan administrasi perkantoran yang dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan administrasi yang didukung dengan anggaran APBD Kabupaten Tabanan.
2. Pelayanan administrasi kepegawaian yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan hak dan kewajiban aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pelayanan yang diberikan antara lain pelayanan kenaikan pangkat, berkala, penghargaan karya satya lencana, karis/karsu, karpeg, taspen, dan administrasi kepegawaian lainnya.
3. Pelayanan administrasi keuangan yang dilakukan untuk kelancaran pemenuhan hak dan kewajiban aparatur serta pelayanan data keuangan dengan instansi terkait secara berkala maupun insidental sesuai dengan surat



permohonan data dari berbagai instansi baik instansi tingkat daerah maupun pusat.

4. Pelayanan administrasi barang milik daerah yang dilakukan secara baik sesuai aturan yang berlaku sehingga penatausahaan aset, inventaris, persediaan, rencana kebutuhan, dan rencana pemeliharaan barang milik daerah sudah valid dan akuntabel.

b. Kinerja Pelayanan pada Instansi

Pelayanan pada instansi horizontal dilakukan dengan optimal sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur. Adapun kinerja pelayanan data dan informasi kepada instansi horizontal secara periodik maupun insidental kepada Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, instansi pusat di daerah untuk penyediaan data statistik perikanan, data pembangunan, data neraca pangan, data profil daerah, data publikasi, data pengarusutamaan gender, dan informasi data terpilah, dan lainnya.

Pelayanan pada instansi vertikal dilakukan dengan optimal sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur. Adapun kinerja pelayanan data dan informasi kepada instansi vertikal secara periodik maupun insidental kepada Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian/ Lembaga dan UPT pusat di daerah untuk penyediaan data dan informasi program, kegiatan, anggaran, statistik, dan lainnya.

c. Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat

Kabupaten Tabanan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 dalam penjabaran misinya berfokus pada pangan, sandang, papan. Pembangunan perikanan diupayakan untuk memberikan pelayanan kepada stakeholder sesuai amanah Peraturan Bupati Tabanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan. Pelayanan diberikan agar kontribusinya pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten terus meningkat. Pengukuran layanan melalui survey kepuasan masyarakat (SKM) sehingga diketahui indeks kepuasan



masyarakat IKM) dan dilaporkan secara berkala dalam laporan pelayanan publik.

Pelayanan pengaduan masyarakat atas pelayanan aparaturnya difasilitasi melalui kotak saran, sms, telepon, surat menyurat, email, dan lainnya. Pengaduan sudah semua ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Perikanan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara transparan. Adapun kinerja pelayanan tersebut adalah:

#### 1. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan

Sebagai penjabaran misi pemerintah daerah yang berfokus pada pangan, sandang, papan, maka Dinas Perikanan di Kabupaten tabanan dengan potensi terbesar pada pengembangan perikanan budidaya diharapkan mampu menghasilkan produk unggulan daerah. Upaya pelayanan yang sudah dilakukan dalam penyediaan sarana dan prasarana pokok dan pendukung yaitu:

##### a. Penyediaan benih ikan bermutu

Pelayanan akan benih ikan didukung oleh 4 unit Balai Benih Ikan (BBI lokal), 1 unit Rural Credit Project (RCP), 3 unit Kolam Pembenuhan Ikan (KPI) dan 42 Unit Perbenihan Ikan Rakyat (UPR) yang keberadaannya tersebar di 10 Kecamatan yang semuanya selalu dibina dan diawasi oleh dinas dalam upaya menghasilkan benih bermutu dan jelas ketelusurannya. Adapun produksi benih yang diserap pasar seperti di bawah ini.

Tabel 2. 5 Produksi Benih Ikan

<b>Tahun</b>	<b>Produksi (ekor)</b>	<b>Komoditas</b>	<b>Produsen benih</b>
2017	15.500.000	Nila, lele, karper, gurame, kodok	BBI, UPR
2018	16.010.000	Nila, lele, karper, gurame, kodok	BBI, UPR
2019	15.600.000	Nila, lele, karper, gurame, kodok	BBI, UPR
2020	16.407.000	Nila, lele, karper, gurame, kodok	BBI, UPR
2021	16.708.000	Nila, lele, karper, gurame, kodok	BBI, UPR

Sumber : Laporan Tahunan UPTD, 2021

##### b. Pengembangan budidaya ikan air tawar



Produksi ikan konsumsi diusahakan di kolam, sawah/penyelang, saluran irigasi, kolam deras dan keramba jaring apung. Hasil analisis lima tahunan menunjukkan produksi berfluktuasi karena pengaruh agroklimat tidak sepenuhnya dapat dimanipulasi dengan teknologi adaptif dalam budidaya ikan. Adapun perkembangan produksi ikan di kolam seperti di bawah ini:

Tabel 2. 6 Produksi Ikan Konsumsi Air Tawar

Sumber produksi	Luas lahan/ ha	Produksi / tahun / ton				
		2017	2018	2019	2020	2021
Kolam	27,63	3.213,4	3.284,60	2.980,64	2.928,46	2.896,51
Sawah	44,28	70,1	73,30	64,94	139,12	184,19
S. irigasi	2,94	27,1	29,04	22,82	27,16	14,55
Keramba Jaring Apung	0,25	3,8	3,39	2,88	1,68	7,11
Jumlah	75,00	3.314,4	3.390,3	3.071,3	3.096,4	3.102,36

Sumber : Perikanan Dalam Angka, 2021

## 2. Pemberdayaan Nelayan

Kabupaten Tabanan memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan perikanan tangkap di laut yang dilakukan oleh nelayan skala kecil yang tersebar di 12 desa pesisir di sepanjang garis pantai 34,4 km. Semua nelayan sudah terdaftar dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) sehingga memudahkan dalam pembinaan, pemberian sarana dan prasarana, dan pengawasan hasil tangkapan.

Penangkapan ikan ramah lingkungan di perairan umum (sungai dengan luas 408 ha dan danau seluas 337 ha) dilakukan oleh nelayan skala kecil yang tersebar di 10 kecamatan dengan alat tangkap pancing, bubu, dan jala. Adapun perkembangan produksi ikan di laut seperti di bawah ini:

Tabel 2. 7 Hasil Tangkapan Ikan di Laut Dan Perairan Umum

Sumber produksi	Jenis ikan	Produksi /tahun/ton				
		2017	2018	2019	2020	2021
Laut	Ikan, udang	563,1	580,91	602,67	628,54	635,47
Sungai	Ikan, udang	95,54	98,6	100,64	101,84	100,61



Danau	Ikan, udang	18,6	19,25	22,43	24,19	26,00
Jumlah		677,26	676,76	725,74	754,54	762,10

Sumber : Perikanan Dalam Angka, 2021

### 3. Pengembangan Produk Bernilai Tambah

UKM/ poklhasr binaan dinas sudah memahami pentingnya inovasi dalam peningkatan daya saing produk perikanan yang mana sifat dasar ikan yang *farisable food* akan bernilai tambah apabila disentuh dengan teknologi pengolahan dan pengemasan yang tepat. Teknologi pengolahan ikan sesuai pengelompokan Ditjen Peningkatan Daya Saing KKP ada 10 macam, namun di Tabanan yang sudah berkembang sesuai jensi teknologinya baru 4 macam yaitu pemindangan (ikan pindang), pengasapan (ikan asap), pelumatan (bakso, nugget, luluh sate, ldrang, chip), dan pengolahan lainnya pepes, kripik belut, nila renyah, sate ikan, krupuk kulit ikan, abon, teri wijen). Adapun datanya disajikan seperti berikut ini.

Tabel 2. 8 Produk Olahan Hasil Perikanan

Jenis olahan (jenis)	Produksi olahan/ Tahun/ Ton				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pemindangan	2.127,75	2.167,57	2.200,62	2.169,64	2.150,74
Pelumatan	195,31	12,81	11,64	161,70	209,19
Olahan lainnya	36,19	222,63	233,50	122,03	150,01
Jumlah	2.359,25	2.403,01	2.445,76	2.453,37	2.509,93

Sumber : Perikanan Dalam Angka, 2021

Distribusi dan pemasaran produk perikanan terus dibina dan diawasi baik produk lokal maupun produk luar daerah yang diserap pasar. Adapun ikan yang dipasarkan seperti :

- Ikan hidup seperti ikan lele, belut, gurami, nila, patin
- Ikan segar seperti ikan lemuru, bandeng, tongkol, kembung, cakalang, udang, kuniran, layur, kekerangan, siput air, nila, mas, cumi, dan lainnya



- Ikan olahan seperti pindang, pepes, sate, bakso, abon, belut goreng, nila rapuh tulang, teri wijen, ikan asin, petis, dendeng, ladrang, naget, dan lainnya.

Selain pemasaran ikan untuk bahan pangan juga dipasarkan produk perikanan bernilai ekonomis tinggi (produk non konsumsi) seperti :

- Ikan hias air tawar seperti koi, komet, koki bali, manvis, dan lainnya
- Kerajinan kekerangan untuk hiasan rumah, sarana upacara, dan lainnya

#### 4. Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Komitmen pemerintah daerah yang berupaya memelihara, menjaga, melestarikan dan mengembangkan sumberdaya perikanan dan kelautan didukung oleh kelompok masyarakat pengawas, desa pakraman dan karang taruna. Kelompok masyarakat pengawas swakarsa yang ada sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Keragaan Pokmaswas Produktif

No	Nama Klp	Alamat	Tahun berdiri	Jumlah anggota	Pengurus
1	Tirta Gangga	Ds Sudimara, Kec Tabanan	2003	83	Nym Joto
2	Mina Bahari	Ds Tibubiu Kec Kerambitan	2004	94	Wy Bandem
3	Bala Baruna	Ds Antap Kec Selemadeg	2006	104	Wy Adi Kusuma
4	Baruna Gangga	Desa Sudimara Kec Tabanan	2011	10	I Wayan Mario
5	Bala Tirta Segara	Desa Selabih Kec Selemadeg Barat	2012	30	Dewa Ketut Swastika
6	Enjung Gejer	Desa Lalanglinggah Kec Selemadeg Barat	2012	25	Gede Kertadana



7	Wahyu Segara	Desa Tegal Mengkeb Kec Selemadeg Timur	2014	66	Gusti Putu Sudela
8	Dwi Loka Tirta	Desa Beraban Kec Kediri	2015	24	I Made Suarsa
9	Camplung Murti Segara	Desa Beraban Kec Selemadeg Timur	2015	40	I Gede Budiasa
10	Bali Turtle Concervation Farm	Desa Lalanglinggah, Kec Selemadeg Barat	2016	15	Gede Sastra Kumala Putra
11	Bhuana Samudra Jaya	Desa Berembeng Kec Selemadeg	2016	26	I Made Jana

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Perikanan, 2021

Pengembangan sumber daya manusia pelaku utama perikanan binaan dinas dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, studi banding, temu teknis, temu kemitraan, dan temu usaha sehingga terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha, baik sumber dananya dari APBD maupun APBN.

Tabel 2. 10 Peningkatan SDM Pelaku Perikanan

Tahun	Pelatihan pelaku utama perikanan / orang / thn				
	Pembudidaya	Nelayan	Pengolah ikan	Masyarakat	Pokmaswas
2017	20	20	0	0	0
2018	50	20	0	0	0
2019	30	25	25	0	0
2020	25	0	0	0	0
2021	96	58	53	0	0

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Perikanan, 2021

Penyebarnya data dan informasi pembangunan perikanan dan kelautan telah dipertimbangkan oleh dinas, sehingga diusahakan penyediaan data yang *up to date* yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam bentuk brosur, liflet, buku, dan lainnya. Informasi



pembangunan juga disebarluaskan melalui papan informasi dan *website* secara berkala.

## 5. Perkembangan Anggaran

Dinas Perikanan dalam pembangunan didukung oleh anggaran APBD Kabupaten. Dukungan anggaran tersebut sesuai dengan kebijakan umum anggaran daerah. Dinas Perikanan juga memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Adapun datanya seperti di bawah ini.

Tabel 2. 11 Perkembangan Anggaran Dinas

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp x 1.000)			
	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN DAERAH	108.750	118.550	118.550	118.550
Pendapatan Asli Daerah	108.750	118.550	118.550	118.550
Hasil pajak daerah	-	-	-	-
Hasil retribusi daerah	108.750	118.550	118.550	118.550
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	8.866.401	9.913.604	7.161.367	6.537.551
Belanja tidak langsung	5.710.317	5.487.247	5.284.840	4.307.925
Belanja langsung	3.156.083	4.426.357	1.876.527	2.229.626
PEMBIAYAAN	-	-	-	-
Penerimaan pembiayaan	-	-	-	-
Pengeluaran pembiayaan	-	-	-	-

Sumber: DPA, 2018,2019,2020,2021

### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten terbagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kabupaten Tabanan memiliki kedua potensi tersebut yang sangat mungkin diberdayakan untuk meningkatkan sumber ekonomi daerah. Garis pantai sepanjang + 34,4 km dengan potensi perikanan tangkapnya merupakan sumberdaya yang harus dilestarikan. Potensi perikanan air tawar juga cukup besar karena Tabanan memiliki



sumber-sumber air permukaan yang relatif cukup banyak. Walaupun potensi sumberdaya perikanan yang ada di Kabupaten Tabanan cukup banyak, sampai saat ini masih sangat terbatas jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan atau pembudidaya ikan. Sebagian besar nelayan atau pembudidaya ikan menjadi mata pencaharian tambahan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan keluarga. Kinerja urusan kelautan dan perikanan yang targetnya tertuang di RPJMD SB dapat dilihat capaiannya seperti berikut ini:

Tabel 2. 12 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tabanan

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi perikanan budidaya	Kg	3.314,4	3.390,9	3.071,3	3.096,3	3.102,4
2	Produksi perikanan tangkap	Kg	677,2	698,8	725,7	754,6	
3	Prosentase peningkatan produksi ikan	%	1,3	2,5	1,2	1,4	
4	Produksi benih	Ribu ekor	15.500	16.015	15.600	16,407	
5	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	Klp/thn	60	71	96	70	96
6	Cakupan bina kelompok nelayan	Klp/thn	45	532	52	56	
7	Angka konsumsi ikan	Kg/kap/th	29,9	30,6	31,2	31,4	

Sumber: LKjIP, 2016-2021

Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Tabanan masih terbilang rendah, bahkan perikanan tangkap belum mencapai 1 ton per tahun. Demikian pula, peningkatan produksi dari tahun ke tahun masih sangat rendah (rata-rata kurang dari 2% per tahun). Walaupun tingkat produksi rendah, kesadaran masyarakat mengkonsumsi ikan kecenderungannya terus meningkat. Peluang usaha yang cukup menjanjikan di sektor perikanan dan mulai diminati oleh masyarakat di segmen perbenihan dan pendederan karena siklusnya yang pendek. Hal ini terlihat dari produksi benih ikan yang terus meningkat.

Dari beberapa fakta di atas, dapat disimpulkan potensi ekonomi di sektor perikanan belum berkembang secara baik dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Tabanan secara nyata. Kedepan, kondisi ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius, terutama mengatasi persaingan usaha dari daerah lain. Hasil kajian



tantangan dan peluang pengembangan sumber daya pelayanan sampai lima tahun kedepan disajikan seperti berikut ini.

Tabel 2. 13 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

No	Tantangan Pelayanan	Peluang Pengembangan Pelayanan
1	Sumber daya manusia aparatur dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik belum semua sesuai spesifikasi keahliannya	Mengoptimalkan tupoksi dan mendorong aparatur mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, diklat, workshop, seminar, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
2	Sarana dan peralatan kerja yang belum tersedia sesuai kebutuhan peningkatan kinerja	Menyediakan sarana dan peralatan kerja melalui anggaran APBD dan APBN
3	Kabupaten Tabanan belum mampu membuat branding Tabanan kampung ikan	Pelaku usaha budidaya ikan nila tersebar di 10 kecamatan dari perbagai segmentasi usaha yang memerlukan jaringan pengembangan secara terintegrasi
4	Pembudidaya ikan belum mampu secara optimal menerapkan kaidah Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).	Mengikutkan pelaku usaha dalam pelatihan, studi banding, dan bimbingan teknis baik yang anggarannya dari APBD maupun APBN sehingga dapat memenuhi persyaratan CPIB dan CBIB
5	Aplikasi teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan dan produktif belum optimal	Mensosialisasikan, melatih, dan memberikan bantuan alat tangkap dan armada tangkap yang ramah lingkungan
6	Produk perikanan yang berdaya saing tinggi belum mampu memenuhi standard kelayakan produk dan SKP	Memberikan pelatihan, temu teknis, temu usaha, demonstrasi, pembinaan, dan bantuan sarana pengolahan hasil perikanan
7	Teknologi rantai dingin pemasaran produk dalam menunjang keamanan pangan	Memberikan pembinaan, monitoring/pengawasan, temu usaha, dan bantuan sarana pemasaran rantai dingin
8	Pengembangan kelembagaan kelompok perikanan	Menumbuhkembangkan dan membina kelembagaan kelompok yang didasari oleh jiwa wirausaha



9	Pengembangan data dan informasi yang <i>up to date</i> dan akuntabel	Melakukan pemutakhiran data dan informasi perikanan dan kelautan sebagai layanan informasi masyarakat
10	Belum tersedianya dokumen jangka menengah potensi sumber daya perikanan yang akurat	Menyusun dokumen potensi sumber daya perikanan dan dokumen rencana pengembangan investasi perikanan jangka menengah
11	Belum berkembangnya inovasi daerah yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat perikanan	Mengembangkan inovasi dan kaji terap teknologi adaptif yang lebih produktif



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Kabupaten Tabanan sebagai salah satu kabupaten yang berkembang, dimana Dinas Perikanan sebagai salah satu unit teknis telah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membangun daerah. Kabupaten Tabanan memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang perikanan khususnya perikanan budidaya. Namun kinerja bidang perikanan masih belum memuaskan dari segi produksi perikanan.

Angka konsumsi ikan (AKI) Kabupaten Tabanan tahun 2021 baru mencapai 31,67 kg perkapita per tahun masih dibawah provinsi yang sudah mencapai 38,8 kg perkapita pertahun, dan masih jauh dari nasional yang telah mencapai 54,0 kg perkapita pertahun. Topografi Tabanan yang mendukung pertanian membuat masyarakat lebih memilih konsumsi daging dan sayuran yang tersedia disekitarnya.

Adapun tradisi makan ikan di masyarakat ada tiga jenis yakni ikan nyalian (jenis rasbora), kakul (keong sawah) dan lindung (belut) yang sering disebut sebagai *be carik* yang selama ini belum dibudidayakan atau dengan kata lain merupakan tangkapan dialam bebas. Sehingga untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarkat Tabanan diperlukan kombinasi pelestarian komoditi lokal serta intensifitas perikanan budidaya serta tangkap. Untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan di Tabanan termasuk peningkatan produksi perikanan dihadapi beberapa permasalahan yaitu:

- Rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat yang berujung pada rendahnya daya serap produksi perikanan.
- Rantai distribusi ikan hasil produksi masih panjang yang berakibat dirugikannya pembudidaya ikan.
- Masih terjadinya konflik dalam pemanfaatan air dengan subak yang menjadi kendala pengembangan kegiatan budidaya.
- Pakan masih mengandalkan pellet produksi pabrik yang harganya kian hari terus meningkat berakibat pada tingginya biaya produksi.



- Masih kurangnya produksi benih baik dari UPTD Produksi Perikanan Budidaya maupun unit pembenihan rakyat sehingga masih mendatangkan dari daerah tetangga dan bahkan dari Jawa.

Manajemen di Dinas Perikanan secara berkelanjutan terus melakukan analisa kinerja pembangunan dan berupaya berinovasi dalam pembangunan. Adapun hasil pemetaan permasalahan dan penentuan prioritas dan sasaran pembangunan urusan kelautan dan perikanan kedepan disajikan seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
A 1	Terbatasnya kepemilikan armada tangkap dan alat tangkap oleh nelayan	Terbatasnya permodalan yang dimiliki nelayan	- Hasil tangkapan yang tidak kontinu setiap siklus/ bulannya
2	Fishnig ground dengan ombak besar	Kerusakan armada tangkap dan alat tangkap sangat sering	- Lokasi penangkapan ikan di laut selatan - Alat tangkap mudah rusak
B 1	Belum terpebuhinya kebutuhan benih ikan bermutu baik jenis,kuaitas, dan muantitasnya	Belum semua teknologi pembenihan ikan dikuasai oleh pelaku pembenih	- Belum trampilnya pelaku membenihkan berbagai jenis ikan
2	Belum terbangunnya kampung ikan	Usaha budidaya ikan masih tersebar/ belum tersentral	- Usaha masih bersifat segmentasi - Masih adanya konflik pemanfaatan air subak
3	Serangan hama dan penyakit ikan	Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya belum ssepenuhnya sesuai CBIB dan CPIB	- Rendahnya pengetahuan dan kerampilan pembudidaya ikan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit
C 1	Produk olahan belum dapat bersaing di pasar modern	Kualitas produk belum memenuhi standar	- Poklaksar belum memiliki ijin edar keamanan pangan - Poklaksar belum memiliki sertifikat keamanan pangan



2	Rendahnya kesadaran makan ikan	Ikan belum menjadi pilihan utama dalam konsumsi rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rendahnya pengetahuan akan manfaat makan ikan</li><li>- Kendala distribusi produk perikanan ke seluruh pelosok</li></ul>
3	Rendahnya akurasi data dan informasi perikanan	Belum terbangunnya pengumpulan data secara real time dan presisi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum terbangunnya sistem informasi data base perikanan</li><li>- Mekanisme pengambilan data belum terstandar</li><li>- Enumerator tidak menyampaikan data akurat</li></ul>

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menyusun isu strategis selain melihat permasalahan yang dihadapi, juga dapat melihat pada dokumen perencanaan terkait dari. Dinas Perikanan telah mengidentifikasi isu-isu strategis sesuai tupoksi yang ada dengan mengkaji sinergisitas arah kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Adapun hasil rumusannya adalah

a. Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kabupaten Tabanan memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya air tawar yang cukup besar, sedangkan untuk pengembangan budidaya air payau kurang cocok karena pesisir pantai yang curam dan terjal, begitu juga budidaya laut kurang cocok dikembangkan karena arus dan ombak yang besar dan tidak ada teluk di sepanjang pantai. Pengembangan budidaya air tawar teridentifikasi masih adanya kendala yaitu:

1. Pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam mengelola usaha budidaya ikan masih rendah, sehingga belum banyak pembudidaya ikan menjadi wirausahawan yang maju dan produktif.



2. Debit air yang mulai mengecil serta kualitasnya menurun di berbagai sentra-sentra produksi ikan, sehingga usaha minapadi kurang berkembang.
3. Harga pakan buatan yang terus meningkat sedangkan pakan alternatif belum banyak dikembangkan, sehingga biaya produksi terus meningkat.
4. Penyediaan berbagai jenis ikan konsumsi seperti ikan bawal, gurami, patin, udang galah, dan belut) masih terbatas atau masing-masing mendatangkan dari luar daerah, sehingga harganya relatif lebih tinggi.
5. Penyediaan benih ikan bermutu masih terbatas dan masih ada benih ikan yang dibudidayakan masyarakat belum mampu disediakan daerah seperti benih udang galah, patin, bawal, dan gurame.
6. Masih ditemukan adanya serangan hama dan penyakit ikan, sehingga pembudidaya ikan sering terjadi penurunan hasil panen.
7. Terbatasnya permodalan bagi pembudidaya ikan dalam penyediaan saprokan dan biaya operasional, sehingga usahanya kebanyakan masih berskala mikro dan kecil.
8. Usaha budidaya perikanan yang tersebar dan belum tersentra, sehingga upaya pengaturan produksi, pembinaan, dan pendampingan belum optimal.
9. Inovasi dan kaji terap teknologi adaptif belum berkembang luas sehingga Tabanan menjadi kampung ikan masih memerlukan koordinasi lintas instansi.

b. Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kabupaten Tabanan memiliki potensi pengembangan perikanan tangkap lestari yang masih cukup besar atau belum terjadi *over fishing*. Pengembangan perikanan tangkap teridentifikasi adanya kendala yaitu:

1. Armada perikanan tangkap yang masih kecil (jukung bermesin tempel yang kurang dari 5 GT) sehingga *fishing ground* masih terbatas di pesisir dan hasil tangkapannya pun relatif rendah.
2. Alat tangkap yang digunakan masih sederhana seperti jaring insang hanyut, jaring klitik, jaring tiga lapis, jala, pancing, dan bubu, sehingga tingkat produksinya masih rendah.



3. Pangkalan pendaratan armada tangkap belum tersentral sehingga armada tangkap ditambatkan di sepanjang pantai 12 desa pesisir dan mesin tempel buka pasang untuk keamanannya.
4. Pangkalan pendaratan ikan belum tersentral sehingga ikan yang dihasilkan dipasarkan langsung ke pedagang pengumpul.
5. Penanganan hasil tangkapan di laut (di perahu) belum optimal sehingga mutu hasil tangkapan setelah sampai di darat kurang optimal.
6. Terbatasnya permodalan nelayan untuk pengadaan armada, alat tangkap, dan biaya operasional penangkapan sehingga pengembangan usaha masih rendah.
7. Kurangnya minat generasi muda untuk mengembangkan jiwa baharinya sehingga regenerasi nelayan kurang berkembang.
8. Belum updatenya data *maximal sustainable yealth* (MSY), data populasi nelayan, dan data nilai tukar nelayan sehingga validasi data memerlukan inovasi aplikasi.

c. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kabupaten Tabanan memiliki potensi sumber daya UKM, UPI, Poklaksar yang usahanya mampu memproduksi aneka produk perikanan yang mampu diserap pasar. Pengembangan produk perikanan yang berdaya saing teridentifikasi adanya kendala yaitu:

1. Penanganan rantai dingin baik ikan hidup, ikan segar, maupun bahan baku olahan ikan belum sesuai standar sehingga pemasaran produk olahan basah dan segar masih terbatas jangkauan Kabupaten Tabanan.
2. Produk olahan ikan oleh UKM, UPI, Poklaksar masih belum semuanya dikemas sesuai standar sehingga daya saing produk masih rendah di pasar tradisional dan pasar modern.
3. Teknologi pengolahan ikan masih belum sepenuhnya memenuhi GMP, SSOP, dan SKP sehingga belum banyak produk dapat menembus pasar modern, restoran, hotel dan lainnya.
4. Tingkat konsumsi ikan masyarakat perkapita pertahun masih rendah atau masih di bawah rata-rata konsumsi ikan perkapita pertahun provinsi, sehingga daya serap atau konsumsi ikan hidup, segar, maupun olahan rendah .



5. Manajemen pengelolaan usaha tingkat UKM, UPI, poklhasr banyak yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh permodalan dari perbankan (*bankable*).
6. Unit-unit pengolah dan pemasar ikan hidup, segar, olahan, dan produk nonkonsumsi tersebar, sehingga promosi dan pemasaran produknya belum dikenal luas konsumen.
7. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap UKM, UPI, poklhasr masih rendah sehingga diperlukan pelatihan teknis, magang, dan studi banding.

### **3.2 Telaahan Terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah/WKDH**

Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan visi, misi, dan program prioritas kurun waktu 2021-2026. Perangkat Daerah wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan prioritas pembangunan yang secara teknis dijabarkan dalam renstra perangkat daerah. Dinas Perikanan telah menganalisis dan menjabarkannya dalam rencana strategis yaitu:

a. Telaah terhadap visi

Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan lokal, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan lima tahun ke depan dinyatakan sebagai berikut Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Tabanan Era Baru: Aman Unggul Madani.

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan karma dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).



Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan sradra, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

b. Telaah terhadap misi

Misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan tabanan 2021-2026, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah “Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas:

1. Pangan, Sandang, dan Papan
2. Pendidikan dan Kesehatan
3. Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Agama, Tradisi, Seni,
5. Pariwisata

Adapun penjabaran atas visi pemerintah daerah telah ditetapkan 3 misi pembangunan daerah yaitu:

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)

Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Dinas Perikanan sesuai kewenangan, urusan, dan tupoksinya, maka difokuskan pada penjabaran atas misi pangan, sandang, papan. Misi pada pangan ini sangatlah pokok bagi pembangunan daerah Tabanan dalam menyediakan kebutuhan ikan sebagai bahan pangan yang bergizi dan berkualitas dalam memcerdaskan manusianya.



c. Telaah terhadap program prioritas

Asta Program merupakan prinsip pembangunan daerah Kabupaten Tabanan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. dan I Made Edi Wirawan, S.E. sebagai pedoman dan bintang pemandu dalam melaksanakan tugas-tugas selaku Kepala Daerah periode tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan dengan Asta Program memiliki nilai dan arti strategis dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat Tabanan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan. Asta Program dijabarkan atas: Dinas Perikanan sebagai unit teknis di Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pembangunan urusan kelautan dan perikanan mengacu pada asta program prioritas pemerintah Kabupaten Tabanan, yaitu:

1. Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah
2. Data Desa Presisi
3. Reformasi Birokrasi
4. Pembangunan Rohani dan Jasmani Yang Sehat dan Kuat
5. Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan Sosial
6. Pembangunan Hukum yang Berkeadilan
7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
8. Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian, Provinsi dan Kabupaten**

Tinjauan RPJMN 2019-2024 dilakukan agar arah kebijakan RPJMDSB Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih sejalan, sejalur dan tegak lurus terhadap kebijakan di tingkat nasional sehingga dapat saling mendukung dan menguatkan dalam mencapai hasil pembangunan yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan setelah dikelompokkan menurut Bidang Pola Pembangunan Semesta Berencana.

Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan merupakan unit teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang menjalankan tugas pokok di urusan kelautan dan



perikanan. Untuk menjalankan amanah tersebut maka sinergisitas dan keterpaduan perencanaan pusat, provinsi, dan daerah memegang peranan penting, maka Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan telah menelaah rencana strategis kementerian terkait utamanya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

a. Telaah Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan secara vertikal dalam perencanaan pembangunan mengacu pada rencana strategis. Sinergisitas pembangunan pusat dan daerah terus dikoordinasikan dalam musrenbangnas, rakornas, rateknis, dan rapat-rapat koordinasi yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Arah kebijakan, strategi dan langkah operasional tersebut di atas, akan dilaksanakan melalui 10 program pembangunan kelautan dan perikanan, yakni:

1. Program Pengelolaan Ruang Laut.
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
3. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya.
4. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan.
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
8. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP.
10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP.



b. Telaah Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Tinjauan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dimana Pemerintah Provinsi Bali merencanakan pengembangan pangan di seluruh Bali. Untuk pengembangan pangan dari bidang perikanan Kabupaten Tabanan sebagai kawasan minapolitan perikanan budidaya yang diarahkan tersebar diseluruh kecamatan.

Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan secara vertikal dalam perencanaan pembangunan mengacu pada rencana strategis. Sinergisitas pembangunan kabupaten dan Provinsi Bali dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana terus dikoordinasikan dalam forum-forum OPD sehingga secara teknis perencanaan pembangunan khususnya pembangunan perikanan dapat dianggarkan dengan adanya dukungan APBD Provinsi Bali. Adapun program prioritas yang terus disinkronisasikan antara lain :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi,
2. Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut,
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan,
4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan,
5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap,
6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan,
7. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,
8. Program Pelayanan dan Pengembangan Usaha Perikanan,
9. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut,
10. Program Pengembangan Perbenihan Perikanan,
11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan
13. Program Peningkatan Kerjasama Antar Dinas Kelautan dan Perikanan.



c. Telaah RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat (1), Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD SB yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tabanan.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD SB. Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan RPJMD SB.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD SB yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah tersebut bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD SB Tahun 2021-2026.



### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tabanan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan, dimana tata ruang pengembangan perikanan dan kelautan sesuai Bab IV Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten menyebutkan :

Tabel 3. 2 Dasar Hukum Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

Pasal	Uraian	Kajian Rencana Lokasi Pemanfaatan
34	Peruntukan untuk kawasan sempadan pantai	Kecamatan Kediri, Tabanan, Kerambitan, Selemadeg Timur, Selemadeg, Selemadeg Barat
40	Peruntukan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	Kecamatan Kediri, Tabanan, Kerambitan, Selemadeg Timur, Selemadeg, Selemadeg Barat
50 Ayat 1	Peruntukan kawasan peruntukan perikanan meliputi : kawasan peruntukan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan ikan	Agribisnis (budidaya, penangkapan, dan pengolahan ikan) yaitu Kecamatan Penebel, Tabanan, Kediri, Kerambitan, Selemadeg Timur, Selemadeg, Selemadeg Barat, Marga, Baturiti, dan Pupuan.
Ayat 2	Peruntukan perikanan tangkap meliputi : perikanan tangkap di perairan danau di Danau Beratan dan waduk di Waduk Telaga Tunjung. Perikanan tangkap di perairan laut skala kecil di 12 desa pesisir dan perikanan laut skala menengah di pangkalan pendaratan ikan	Untuk perikanan tangkap danau Beratan Kecamatan Baturiti, sungai bendungan, dan waduk tersebar di 1 Kecamatan Penebel, Tabanan, Kediri, Kerambitan, Selemadeg Timur, Selemadeg, Selemadeg Barat, Marga, Baturiti, dan Pupuan. Perikanan tangkap di laut tersebar di 6 kecamatan Kediri, Tabanan, Kerambitan, Selemadeg Timur, Selemadeg, Selemadeg Barat
Ayat 3	Peruntukan budidaya perikanan di Danau Beratan berupa budidaya keramba jaring apung, budidaya di sawah, budidaya di perairan	Budidaya ikan jaring apung di Kecamatan Baturiti. Budidaya ikan nila, lele, karper, gurame, udang galah di usaha kolam, sawah, dan irigasi dikecamatan Penebel, Tabanan, Kediri, Kerambitan, Selemadeg Timur,



	umum, di saluran irigasi, budidaya di kolam air tenang, dan usaha pembenihan ikan di Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Ikan Rakyat	Selemadeg, Selemadeg Barat, Marga, Baturiti, dan Pupuan. Pengembangan panti-panti benih ikan di 4 unit Balai Benih Ikan (BBI), 1 unit RCP, 42 unit UPR.
Ayat 4	Peruntukan kawasan minapolitan Kecamatan Penebel dan Tabanan yang didukung oleh sarana Pasar Ikan Tuakilang	Pengembangan integrasi hulu hilir di kawasan minapolitan dan pasar ikan lokal yang mempromosikan dan menjual ikan hidup, segar, olahan, dan produk-produk kekerangan
Ayat 5	Peruntukan kawasan pengolahan ikan di sentra-sentra industri kecil dan kerajinan rumah tangga	Lokus pengolahan ikan di Kecamatan Tabanan dan industri kecil di Penebel, Tabanan, Kediri, Kerambitan, Selemadeg Timur, Selemadeg, Selemadeg Barat, Marga, Baturiti, dan Pupuan
Ayat 6	Peruntukan perikanan di kawasan pesisir Tabanan di luar kawasan pusat-pusat pariwisata	Integrasi wisata bahari dengan perikanan tangkap di Kecamatan Kediri, Tabanan, Kerambitan, Selemadeg Timur, Selemadeg, Selemadeg Barat

Dinas Perikanan sesuai tupoksi telah melakukan telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten. Hasilnya disajikan seperti tabel di berikut ini:

Tabel 3. 3 Telaah RTRW

No	RTRW terkait tugas dan fungsi	Lokus	Permasalahan pelayanan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Pemanfaatan ruang usaha perbenihan dan pembesaran ikan	10 Kecamatan	Sinergisitas pemanfaatan pemanfaatan air	Usaha pengelolaan air mengikuti pola subak	Efektivitas pemanfaatan air
2	Pemanfaatan ruang penangkapan ikan di laut dan perairan umum	10 Kecamatan	Sinergistas pemanfaatan wilayah pesisir dan perairan	Komplik pendaratan jukung dan alat tangkap	Keterpaduan wisata bahari dan wisata tirta



			umum		
3	Pemanfaatan ruang pengolahan hasil perikanan	10 Kecamatan	Sinergisitas pengolahan limbah	Konflik lingkungan	Kajian AMDAL
4	Pemanfaatan ruang pelestarian sumber daya perikanan	10 kecamatan	Sinergisitas pemangku kepentingan	Sampah, pestisida, limbah lainnya	Sapta pesona

### 3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS merupakan pendekatan strategi jangka panjang pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia yaitu : (a) memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya; (b) memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan (c) memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai. Pelaksanaan KLHS RPJMD SB meliputi pengkajian tentang pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pelaksanakan KLHS terhadap dokumen-dokumen perencanaan, termasuk RPJMD SB guna meminimalisir dampak negatif pelaksanaan pembangunan.

Dinas Perikanan telah melakukan kajian secara mendalam terhadap lingkungan hidup strategis. Hasil analisis terhadap dokumen lingkungan hidup strategis disajikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3. 4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	KLHS	Perumusan program urusan kelautan dan perikanan
1	Memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya,	Pengelolaan perikanan budidaya Pengelolaan perikanan tangkap



	dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya	
2	Memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
3	Memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Dinas Perikanan juga telah melakukan analisis sesuai tugas pokok dan fungsinya baik terhadap faktor internal maupun faktor eksternal dengan analisa SWOT. Hasil kajian tersebut adalah :

a. Kekuatan

Kabupaten Tabanan memiliki kekuatan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang selaras dengan RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2005-2025 yang berbasiskan pertanian. Sumber kekuatan itu yaitu:

1. Potensi sumber daya perikanan yang layak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Adapun potensi tersebut yaitu:
  - Budidaya ikan air tawar di kolam dengan potensi pengembangan 1.014,4 ha, di sawah melalui minapadi dan penyelang dengan potensi pengembangan 1.158,2 ha, di saluran irigasi dengan potensi pengembangan 114,5 ha, di keramba jaring apung dengan potensi pengembangan 5,0 ha.
  - Penangkapan ikan ramah lingkungan di laut dengan potensi lestari 3.510,0 ton/ tahun, di perairan umum (sungai seluas 408 ha dan danau seluas 337 ha).
  - Peningkatan daya saing produk bernilai tambah dengan potensi pengembangan teknologi pemindangan, pelumatan, pengasapan, fermentasi, dan lainnya oleh UKM, UPI, poklhasar, BUMDes.



- Pelestarian sumber daya hayati oleh masyarakat pengawas swakarsa di masing-masing sentra produksi budidaya, penangkapan, pengolahan, dan pemasaran produk perikanan dalam menjaga keberlanjutan (*sustainable*) dan keamanan pangan.

## 2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung

Komitmen pemerintah daerah dalam melengkapi sarana dan prasarana pendukung sangat tinggi agar pelayanan kepada stakeholder terkait dapat lebih optimal. Sarana dan prasarana yang sudah diadakan antara lain:

- Balai Benih Ikan sebagai produsen benih yang dikelola pemerintah yang berjumlah 4 unit (BBI Bolangan, BBI Penebel, BBI Meliling, dan BBI Pesiapan), *Rural Credit Project* yang dikelola pemerintah berjumlah 1 unit, Kolam Pembenihan Ikan yang dikelola masyarakat dan 42 unit Pembenihan Ikan Rakyat yang tersebar di 10 kecamatan yang menyediakan benih ikan untuk dibudidayakan menjadi ikan konsumsi.
- Bangsal nelayan/ minidocking sebagai tempat penambatan armada tangkap yang tersebar di 12 desa pesisir.
- Bangsal pengolahan, rumah kemasan, kios pemasaran ikan segar dan produk nonkonsumsi.
- Jalan produksi di sentra-sentra produksi perikanan sehingga distribusi hasil tangkapan menjadi mudah dan lancar.

## 3. Tersedianya informasi teknologi perikanan

Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan membuka peluang dan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi dan pelayanan. Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai peranan penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi terutama menggerakkan industri perikanan dan pengembangan pasca panen.

### a. Meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat

Keberhasilan pembangunan disamping ditentukan oleh stabilitas keamanan juga sangat diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana penunjang,



serta adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat yang merupakan implementasi dari kebijakan paradigma pembangunan yang partisipatif yaitu dari-oleh-dan untuk rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari peranan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan di bidang perikanan antara lain terbentuknya kelompok pembudidaya ikan, Kelompok Usaha Bersama nelayan, Kelompok usaha garam rakyat, serta Kelompok masyarakat pengawas yang setiap tahunnya terus bertambah /meningkat dari jumlah dan kualitasnya. Hal ini diakibatkan karena semakin baiknya sarana dan prasarana perikanan dan fasilitas pendukung lainnya.

b. Peraturan perundang-undangan di urusan kelautan dan perikanan

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan sudah semakin berkembang yaitu:

- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perikanan yang direvisi dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032.

c. Potensi sumber daya manusia perikanan

Pembangunan perikanan dan kelautan sangat diduung oleh pelaku usaha perikanan sebagai penggerak roda ekonomi agribisnis perikanan, dimana di tahun 2021 sudah terbina 42 unit pembenihan ikan rakyat (42 orang), 516 kelompok pembudidaya ikan (7.903 orang), 78 kelompok nelayan (1.090 orang), 65 poklahsar (898 orang), 11 kelompok pengawas masyarakat swakarsa (327 orang). Masing-masing sumber daya manusia tersebut mengelola dan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang ada di wilayahnya sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal dan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam pembangunan kelautan dan perikanan diperlukan sumberdaya manusia yang



memiliki keterampilan, beretos kerja, produktif, maju, efisien, profesional dan mempunyai kemampuan kewiraswastaan sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja.

b. Kelemahan

Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan telah mengkaji adanya kelemahan yang harus diantisipasi, yaitu:

1. Rendahnya kualitas sumber daya pelaku utama perikanan dalam penanganan pasca panen dan mutu hasil perikanan

Masih rendahnya nilai tambah dan tingginya angka kehilangan hasil perikanan karena proses pasca panen yang kurang baik. Diakui bahwa kemampuan teknologi pasca panen (penanganan dan pengolahan) produk perikanan sesuai dengan selera konsumen, standarisasi mutu produk, dan keamanan pangan masih rendah. Hal ini disebabkan masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha perikanan khususnya nelayan di bidang penanganan hasil, mulai dari sejak ikan di tangkap sampai ke tangan konsumen belum sepenuhnya memenuhi persyaratan mutu dan higienitasnya yang berakibat pada rendahnya harga produk hasil perikanan.

2. Struktur usaha perikanan yang kurang berimbang

Masih timpangnya struktur usaha perikanan ini terutama terjadi pada pemanfaatan peluang di usaha:

- Penangkapan ikan yang diusahakan oleh nelayan skala kecil yang menangkap ikan di daerah pesisir dengan hasil tangkapan yang rendah sedangkan populasi ikan bernilai ekonomis tinggi banyak di laut lepas yang dimanfaatkan oleh nelayan andon dan nelayan skala besar di luar Kabupaten Tabanan.
- Budidaya ikan yang dilakukan oleh pembudiaya ikan skala kecil utamanya pengaturan produksi di musim kemarau yang sulit memperoleh benih ikan sehingga ada kekosongan proses produksi yang menyebabkan banyaknya ikan dari luar daerah masuk ke Tabanan.



- Pengolahan produksi perikanan yang dilakukan oleh UKM, UPI, poklhasar, BUMDes dalam penyediaan bahan baku utamanya bahan baku ikan tuna, lemuru, tongkol, cakalang, slungsung, belut, dan ikan lainnya.
- Pemasaran produksi lokal yang sulit memenuhi kuota pasar yang meminta dalam jumlah dan ukuran tertentu serta kontinuitas pemenuhannya sehingga pasar tradisional dan pasar modern tetap memasukkan ikan hidup, segar, dan olahan dari luar Tabanan.

### 3. Data dan informasi perikanan belum terkelola dengan baik

Data serta informasi tentang perikanan dan kelautan masih terbatas dan belum tertata dengan baik dalam suatu sistem jaringan, sehingga sulit mengaksesnya untuk menetapkan suatu kebijakan. Selain itu, tingkat akurasi dan validasinya perlu dioptimalkan dari tahun ke tahun. Dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan, ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu menjadi salah satu faktor penting. Statistik perikanan yang ada saat ini dirasakan masih belum menyajikan data perikanan yang cukup akurat, lengkap dan detail. Masih terbatasnya data dan informasi mengenai potensi kelautan dan perikanan serta sosial ekonomi perikanan untuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya.

### 4. Ketersediaan sarana dan prasarana produksi perikanan masih terbatas

Agribisnis perikanan di Kabupaten Tabanan belum dapat berkembang optimal karena sarana dan prasarana produksi masih terbatas dimana belum meratanya sebaran depo/ koperasi penyedia sarana produksi (pakan, peralatan produksi, obat/ probiotik, pupuk, dan lainnya) di masing-masing kecamatan sentra produksi sehingga pelaku utama perikanan harus ke kota untuk pemenuhannya.



c. Peluang

Dinas Perikanan telah mengkaji peluang pengembangan sektor perikanan dalam jangka menengah, yaitu:

1. Pemanfaatan potensi sumber daya belum optimal, merata, dan seimbang

Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya urusan kelautan dan perikanan yang belum optimal, merata, dan seimbang dengan potensi sumberdaya perikanan yang tersedia. Pemanfaatan yang belum optimal karena tingkat pemanfaatannya masih berada dibawah potensi yaitu:

- Pemanfaatan potensi tangkapan lestari belum merata karena antara wilayah perairan dari kecamatan yang satu dengan wilayah perairan kecamatan yang lainnya dan belum seimbang antara tingkat pemanfaatan sumber daya ikan pelagis (permukaan) dengan ikan demersal (dasar).
- Kompetisi pemanfaatan ruang/ wilayah (lahan pertanian/ perikanan) antara usaha budidaya perikanan dengan kegiatan pembangunan lainnya (permukiman, industri, pariwisata dan lainnya), yang pada umumnya merugikan usaha budidaya perikanan disamping memburuknya kualitas air sumber usaha budidaya perikanan, khususnya di kawasan padat penduduk atau tinggi intensitas pembangunannya.
- Berkembangnya segmentasi–segmentasi budidaya ikan air tawar dalam rantai agribisnis perikanan menjadi peluang pengembangan kampung nila sehingga daerah Tabanan menjadi penghasil ikan nila utama di daerah Bali.

2. Pelaksanaan otonomi daerah mendukung pembangunan perikanan

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dan dengan kondisi obyektif di daerah/lapangan. Otonomi daerah akan dapat meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat lebih meningkat.



### 3. Tabanan sebagai daerah tujuan wisata kuliner

Potensi budaya sebagai daya tarik kepariwisataan yang dimiliki daerah Bali akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan perkembangan hotel terutama restoran/ rumah makan serta wisata kuliner lainnya dengan menu ikan, hal ini tentunya akan berdampak langsung terhadap meningkatnya permintaan produk hasil perikanan dan investasi di bidang perikanan baik di sektor hulu, tengah, dan hilir yang pada gilirannya akan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

### 4. Globalisasi

Aspek globalisasi dan masyarakat MEA yang terkait dengan dunia perikanan, yakni aspek ekologi, dimana secara ekologi, telah muncul beberapa kaidah internasional dalam pengelolaan sumberdaya perikanan (*fisheries management*), seperti adanya *Code of Conduct for Responsible Fisheries* yang dikeluarkan oleh FAO (1995). Aturan ini menuntut adanya praktek pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, dimana setiap negara dituntut untuk memenuhi kaidah-kaidah tersebut.

### 5. Permintaan terhadap produk hasil perikanan meningkat

Meningkatnya permintaan terhadap produk hasil perikanan sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai makanan yang bergizi tinggi. Dengan meningkatnya pemenuhan protein hewani yang berasal dari ikan yang berdampak positif terhadap peningkatan gizi dan kesehatan serta kecerdasan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik dalam bentuk ikan hidup, segar, olahan, juga tepung ikan.

#### d. Tantangan

Dinas Perikanan dan Kelautan telah mengkaji adanya tantangan yang harus diantisipasi, yaitu:

##### 1. Degradasi mutu lingkungan perairan

Kualitas lingkungan di Tabanan pada umumnya masih cukup baik hal ini ditunjukkan dengan masih baiknya kualitas udara, air, sungai, air pantai dan air danau. Namun demikian, pada beberapa lokasi seperti daerah-daerah



perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata ada kecenderungan kualitas lingkungan makin menurun karena meningkatnya kepadatan / aktivitas penduduk sehingga berdampak pada meningkatnya zat-zat pencemar. Kondisi ini makin meluas karena makin pesatnya pembangunan fisik yang cenderung memanfaatkan lahan-lahan potensial pengembangan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap di pesisir pantai.

## 2. Persaingan usaha produk hasil perikanan

Pemasaran produk perikanan di pasar dalam negeri sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (*buyer market*). Hal ini mengakibatkan harga jual produk perikanan seringkali kurang menguntungkan pihak produsen (nelayan dan pembudidaya ikan). Ada dua faktor utama yang membuat pemasaran produk perikanan masih lemah. *Pertama*, karena lemahnya *market intelligence* yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera (*preference*) para konsumen. *Kedua*, belum memadainya prasarana dan sarana sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (*delivery*) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu.

## 3. Konflik pemanfaatan sumber daya

Konflik penggunaan ruang di kawasan pesisir dan lautan oleh nelayan dan pelesatri tukik sering terjadi karena belum optimalnya pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang sebagai acuan sektor berkepentingan dan pengaturan kegiatan-kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan pesisir dan lautan.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis pada Dinas Perikanan

Dinas Perikanan telah mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu strategis urusan kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebagai penjabaran atas isu-isu strategis RPJMD Semesta Berencana. Adapun hasil rumusannya sebagai berikut:



- a. Isu-Isu Strategis Pengembangan Perikanan Budidaya
  1. Keterampilan pembudidaya ikan dalam mengelola usaha budidaya ikan masih rendah, sehingga belum banyak pembudidaya ikan menjadi wirausahawan yang maju dan produktif.
  2. Debit air yang mulai mengecil serta kualitasnya menurun di berbagai sentra-sentra produksi ikan, sehingga usaha minapadi kurang berkembang.
  3. Biaya pakan buatan yang terus meningkat sedangkan pakan alternatif belum banyak dikembangkan, sehingga biaya produksi terus meningkat.
  4. Penyediaan berbagai jenis ikan konsumsi seperti ikan gurami, patin, udang galah, dan belut) masih terbatas atau masing-masing mendatangkan dari luar daerah, sehingga harganya relatif lebih tinggi.
  5. Penyediaan benih ikan bermutu masih terbatas dan masih ada benih ikan yang dibudidayakan masyarakat belum mampu disediakan daerah seperti benih udang galah, patin, bawal, dan gurame.
  6. Masih ditemukan adanya serangan hama dan penyakit ikan, sehingga pembudidaya ikan sering terjadi penurunan hasil panen.
  7. Terbatasnya permodalan bagi pembudidaya ikan dalam penyediaan saprokan dan biaya operasional, sehingga usahanya sebagian besar masih berskala mikro dan kecil.
  8. Usaha budidaya perikanan yang tersebar dan belum tersentra, sehingga upaya pengaturan produksi, pembinaan, pendampingan, pengembangan kawasan memerlukan inovasi dalam membangun kampung-kampung ikan sebagai penyedia bahan pangan ikan.
  
- b. Isu-Isu Strategis Pengembangan Perikanan Tangkap
  1. Armada perikanan tangkap yang masih kecil (jukung bermrsin tempel yang kurang dari 5 GT) sehingga *fishing ground* masih terbatas di pesisir dan hasil tangkapannya pun relatif rendah. Langkah yang akan ditempuh kedepan adalah motorisasi armada tangkap sehingga *fishing ground* lebih dari 3 mil, eksploitasi sumberdaya perikanan tidak sampai *over fishing* di suatu wilayah, ikan-ikan yang tertangkap lebih bervariasi dan hasil tangkapan lebih banyak.



2. Alat tangkap yang digunakan masih sederhana seperti jaring insang hanyut, jaring klitik, jaring tiga lapis, jala, pancing, dan bubu yang tingkat produksinya masih rendah. Langkah yang akan ditempuh kedepan adalah mendorong diversifikasi alat tangkap yang produktif namun ramah lingkungan seperti jaring insang hanyut, jaring klitik, jaring tiga lapis, jala, pancing, dan bubu.
  3. Pangkalan pendaratan armada tangkap belum tersentral sehingga armada tangkap ditambatkan di sepadan pantai. Langkah yang akan ditempuh kedepan adalah menata pangkalan pendaratan armada tangkap dan membangun bangsal jukung / minidocking di 12 desa pesisir.
  4. Pangkalan pendaratan ikan belum tersentral sehingga ikan yang dihasilkan dipasarkan langsung ke pedagang pengumpul. Langkah yang akan ditempuh kedepan adalah menata pangkalan pendaratan ikan di 12 desa pesisir sehingga hasil tangkapan dapat dijual secara layak kepada pedagang ikan.
  5. Terbatasnya permodalan nelayan untuk pengadaan armada, alat tangkap, dan biaya operasional penangkapan. Langkah yang akan ditempuh kedepan adalah membina dan mendampingi usaha nelayan agar mampu bankable sehingga dapat mengakses permodalan ke lembaga perbankan.
  6. Kebiasaan nelayan yang *one day fishing* sehingga upaya penangkapan ikan masih terbatas di pesisir saja sehingga hasil tangkapannya kecil. Langkah yang akan ditempuh kedepan adalah mendorong regenerasi nelayan dan mendorong motorisasi armada tangkap untuk memperluas *fishing ground*.
- c. Isu-Isu Strategis Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
1. Penanganan rantai dingin yang memfasilitasi produk perikanan belum terbangun baik sehingga pemasaran produk olahan basah dan segar masih terbatas jangkauan Kabupaten Tabanan. Langkah yang akan ditempuh kedepan adalah terus mensosialisasikan dan memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada unit-unit pemasar ikan dalam menerapkan rantai dingin sehingga produk yang dipasarkan mutu dan keamanan pangan lebih terjamin.
  2. Produk olahan ikan oleh Poklhasar masih belum diminati pasar dan kalah bersaing dengan produk olahan daging dan buatan pabrik. Langkah yang akan



ditempuh kedepan adalah mengadakan pelatihan, magang, dan studi banding bagi UKM, poklhasar dan BUMDes ke daerah yang telah maju dalam berinovasi menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

3. Pengolahan masih dilakukan secara sederhana dan tradisional sehingga belum memenuhi standar produk yang dapat menembus pasar modern, restoran, hotel dan lainnya. Langkah yang akan ditempuh kedepan adalah memberikan sosialisasi dan pelatihan pengemasan produk sesuai standar pangan bagi poklhasar dan BUMDes.
4. Kesadaran mengkonsumsi ikan masyarakat Tabanan rendah yang ditunjukkan dengan tingkat konsumsi ikan masyarakat perkapita pertahun masih rendah atau masih di bawah rata-rata konsumsi ikan perkapita pertahun provinsi, sehingga masyarakat kurang dalam mengkonsumsi ikan hidup, segar, maupun olahan. Langkah yang akan ditempuh kedepan adalah terus melaksanakan sosialisasi gerakan gemar makan ikan baik melalui anak sekolah, ibu hamil dan menyusui, manula, dan kegiatan adat dan keagamaan lainnya.
5. Usaha poklhasar masih berskala mikro kecil dan belum memenuhi syarat dalam memperoleh permodalan dari bank (*bankable*). Langkah yang akan ditempuh kedepan adalah mendampingi manajemen administrasi, keuangan, dan teknis usaha agar mampu bankable.
6. Promosi dan pemasaran produk belum maksimal dilakukan sehingga belum dikenal luas konsumen. Langkah yang akan ditempuh kedepan adalah membangun sentra pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk konsumsi dan nonkonsumsi sebagai sarana pemasaran dan promosi produk.
7. Diversifikasi produk olahan perikanan belum beragam untuk menembus pasar modern. Langkah yang akan ditempuh kedepan adalah pendampingan teknologi GMP, SSOP dan zero wish, pendampingan sertifikat keamanan pangan.

d. Isu-Isu Strategis Pengembangan Sumber Daya Perikanan

1. Sumber daya aparatur yang tupoksinya membina masyarakat perikanan belum semuanya memiliki kualifikasi bidang perikanan atau memiliki sertifikat keterampilan dasar dan lanjutan di bidang perikanan, padahal



dinamisasi pembangunan perikanan terus meningkat. Langkah yang akan ditempuh kedepan adalah mendorong aparaturnya meningkatkan pendidikan sesuai tupoksinya, mengikutkan aparaturnya dalam diklat, bimtek, dan studi banding.

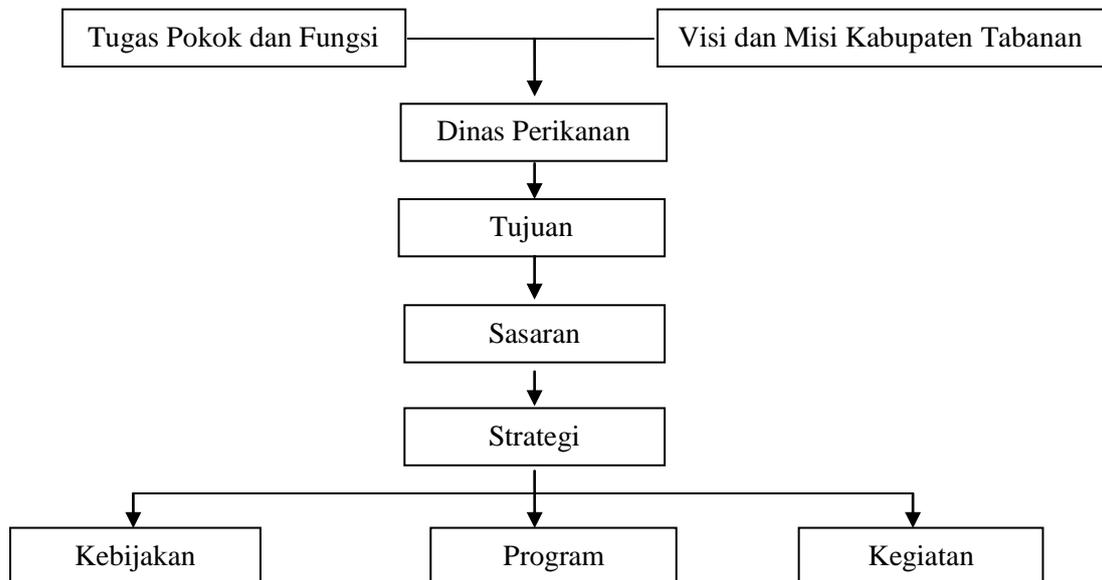
2. Sumber daya pelaku usaha dan pelaku utama perikanan yang pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya belum mencerminkan wirausaha maju sehingga usaha masih kebanyakan berskala mikro kecil dan belum semuanya bankable. Langkah yang akan ditempuh kedepan adalah memberikan pelatihan, magang, studi banding, temu teknis, temu usaha, temu kemitraan, dan pendampingan usaha agar usahanya menjadi produktif dan menguntungkan.
3. Penyediaan data dan informasi yang akurat dan *up to date* masih lemah sehingga pihak-pihak yang membutuhkan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan, evaluasi, maupun investasi kurang didukung oleh data dan penyebarluasannya kurang didukung oleh media informasi. Langkah yang akan ditempuh kedepan adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan/ keahlian aparaturnya dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi.
4. Penyediaan jaringan informasi berbasis IT belum optimal sehingga informasi dan pelaporan masih lebih banyak manual, sehingga diperlukan penganggaran pembangunan jaringan IT dan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kompetensi.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan

Setiap lembaga perlu memiliki tujuan guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2021, yang menggambarkan apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas. Alur pernyataan visi, misi pemerintah daerah dengan tupoksi Dinas Perikanan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4. 1 Alur Pikir Perencanaan

Sejalan dengan semakin berkurangnya sumber daya alam dan jasa lingkungan di daratan yang disebabkan antara lain oleh meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam, jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat serta daerah Bali secara keseluruhan merupakan ekologi pulau kecil, maka revolusi biru mendorong stakeholder untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan harus *sustainable*.

Tujuan ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan mendasarkan kepada faktor-faktor penentu keberhasilan, berarti organisasi telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan



kekurangan/kelemahan serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional. Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan menggambarkan arah startegik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan, serta merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun.

Tujuan Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan disesuaikan dengan tujuan pemerintah daerah dengan semangat baru dan landasan yang lebih kuat. Semangat baru yaitu menjalankan ajaran Tri Sakti, memperkuat landasan yaitu dengan menggali konsep-konsep dasar pembangunan dari para pendiri bangsa melalui “Pembangunan Semesta Berencana”, dan memperhatikan agenda perencanaan pembangunan nasional melalui “Nawacita”.

Adapun penjabaran atas visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD Semesta Berencana yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah Dinas Perikanan sebagai berikut :

- a. Visi KDH dan Wakil KDH : Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui PPSB di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani
- b. Misi KDH dan Wakil KDH
  - Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)
  - Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)
  - Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)
- c. Tujuan KDH dan Wakil KDH
  - Misi 1 dengan 1 tujuan yaitu terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan
  - Misi 2 dengan 1 tujuan yaitu terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan
  - Misi 3 dengan 1 tujuan yaitu terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan



d. Sesuai amanah RPJMD Semesta Berencana Bab V. pada tabel 5.1 Dinas Perikanan lebih lanjut menjabarkan tujuan 2 dan tujuan 2. Untuk tujuan 2 dijabarkan di 2 sasaran pada:

- Sasaran 2 (semua OPD) yaitu: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah

Untuk tujuan 3 dijabarkan di 1 sasaran pada:

- Sasaran 1 (Diskan, Distan, Diskepa) yaitu: Penguatan Sektor Pertanian sebagai unggulan Pembangunan Kabupaten Tabanan

Tujuan 2 (sasaran 2) dan Tujuan 3 (sasaran 1) pada RPJMD Semesta Berencana inilah dijabarkan ke dalam Renstra PD sehingga terjadi sinkronisasi dokumen perencanaan RJMD SB dan Renstra PD. Data seperti berikut ini.

Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan PD

RPJMD SB				Renstra PD
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui PPSB di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan	6 Sasaran	-
	Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan	2.2Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan
	Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)	Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan	3.1Penguatan Sektor Pertanian Sebagai Unggulan Pembangunan Kabupaten Tabanan	Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat

Sumber: RPJMD Semesta Berencana 2021-2026



## 4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran setiap tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan adalah penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan strategi dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 yaitu mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi/ produktivitas dan olahan hasil perikanan sehingga tingkat konsumsi ikan perkapita masyarakat terus meningkat.

Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan merupakan bagian integrasi dari proses perencanaan startegik, dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka panjang yang sifatnya menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Indikator kinerja sasaran disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada sasaran strategis yang dirumuskan menjadi indikator kinerja utama (IKU). IKU yang sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. Dalam petunjuk teknis Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dinamika pengelolaan pemerintahan yang semakin dinamis mendorong perumusan indikator kinerja semakin holistik, maka sesuai hasil pemetaan pohon kinerja beserta turunannya sudah dirumuskan dilakukan IKU (Indikator Kinerja Utama) yang direncanakan dicapai tahun 2021-2026 seperti tabel berikut ini:



Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)''											
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)											
Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)											
Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)											
<b>RPJMD SB KABUPATEN TABANAN</b>		<b>RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN</b>									
Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/ Sumber Data Target Kinerja	Target Kinerja						Kondisi Akhir (2026)
					Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	
Tujuan 2 : Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan	Indek daya saing daerah	Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	Nilai SAKIP dan RB	Hasil reuiu pihak eksternal	C	C	C	B	B	B	B
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Indeks RB	Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Nilai LKjIP	Hasil reiu pihak eksternal	A	A	A	A	A	A	A



Pemerintahan Daerah		Perikanan									
Tujuan 3 : Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan	Indeks gini	Tujuan : Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat	Tingkat konsumsi ikan perkapita masyarakat (kg/ kap/ thn)	Jumlah ikan yang dikonsumsi masyarakat dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan 100	31,49	32.0	32.3	32.5	32.9	33.4	33.8
Sasaran 1 Penguatan Sektor Pertanian Sebagai Unggulan Pembangunan Kabupaten Tabanan	Kontribusi sektor pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	Sasaran 1 : Meningkatnya produksi perikanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan (%)	Jumlah produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap tahun ke N dikurangi Jumlah produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap tahun ke N-1 dibagi Jumlah produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap tahun ke N-1 dikalikan 100%	0,30	0,35	0,55	0,75	0,95	1,10	1,20
		Sasaran :	Prosentase	Jumlah UPI ber-SKP	0	1,6	3,1	4,6	6,0	7,4	10,2



		Meningkatnya daya saing produk olahan hasil perikanan	unit pengolahan ikan yang ber-SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)	dibagi jumlah UPI keseluruhan dikalikan 100%							
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*). Adapun strategi Dinas Perikanan untuk menacapi tujuan dan sasaran yaitu:

- a. Memberdayakan usaha pembudidayaan ikan
- b. Memberdayakan usaha pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
- c. Memberdayakan usaha perikanan tangkap di laut dan perairan umum
- d. Meningkatkan kinerja Dinas Perikanan dalam SAKIP dan RB

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditempuh strategi dan kebijakan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Kebijakan adalah pedoman melaksanakan tindakan-tindakan tertentu. Suatu kebijakan dapat mencakup/mendasari lebih dari satu sasaran/kegiatan. Berbagai kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi Dinas Perikanan seperti tabel di berikut ini:



Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”								
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)								
Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)								
Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)								
Tujuan, sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan Tahunan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<p><u>Tujuan</u> : Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat</p> <p><u>Sasaran</u> : Meningkatkan produksi perikanan</p>	<p><u>Indikator</u> : Tujuan : Tingkat konsumsi ikan</p> <p><u>Indikator</u> : Sasaran : Prosentase peningkatan produksi perikanan</p>	<p>Memberdayakan usaha perikanan budidaya</p>	<p>1). Meningkatkan kualitas induk ikan bermutu dan unggul,</p> <p>2). Revitalisasi lahan budidaya ikan agar lebih produktif</p> <p>3). Pengendalian hama dan penyakit ikan</p> <p>4).</p>	<p>1). Meningkatkan produksi benih ikan bermutu dan unggul, 2). Manajemen pengelolaan air di lahan budidaya ikan</p> <p>3). Pengendalian lingkungan</p> <p>4). Memperkuat unit penghasil PAD</p>	<p>1). Meningkatkan cara pembenihan ikan yang baik,</p> <p>2). Meningkatkan cara budidaya ikan yang baik</p> <p>3). Pengendalian hama dan penyakit ikan</p> <p>4). Memperkuat unit penghasil</p>	<p>1). Meningkatkan kemampuan pembenih ikan agar bersertifikat</p> <p>2). Meningkatkan kemampuan pembudidaya ikan agar bersertifikat</p> <p>3). Pengendalian hama dan penyakit ikan</p>	<p>1). Mengebangkan benih ikan unggul, 2). Mengembangkan komoditas rintisan daerah dan komoditas unggulan daerah</p> <p>3). Pengendalian hama dan penyakit ikan</p> <p>4). Memperkuat unit penghasil PAD</p>	<p>1). Menjadikan Tabanan sentra produksi benih ikan air tawar,</p> <p>2). Menjadikan Tabanan kampung ikan air tawar</p> <p>3). Pengendalian hama dan penyakit ikan,</p> <p>4). Memperkuat unit penghasil PAD</p>



			Menguatkan unit penghasil PAD		PAD	4). Menguatkan unit penghasil PAD		
		Memberdayakan usaha perikanan tangkap di laut dan perairan umum	1). Menotorisasi armada tangkap jukung bermesin 15 PK, 2). Revitalisasi alat tangkap ikan (API)	1). Pengembangan teknologi perawatan armada tangkap, 2). Pengembangan teknologi alat tangkap ikan produktif	1). Penataan tempat pendaratan ikan di 12 desa pesisir, 2). Pendataan RTP nelayan di laut dan perairan umum	1). Penanganan rantai dingin hasil tangkapan ikan di laut dan perairan umum, 2). Pengembangan statistik perikanan tangkap	1). Regenerasi nelayan, 2). Pelatihan teknis	Pemutahiran dokumen MSY (maksimal suantainable yealth) dan dokumen JTB (jumlah tangkapan yang diperbolehkan) agar tidak terjadi over fishing
<u>Tujuan</u> : Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat	<u>Indikator</u> : <u>Tujuan</u> : Tingkat konsumsi ikan	Memberdayakan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1). Pemutahiran data Unit Pengolah Ikan dan Unit Pemasar Ikan, 2). Pendataan sumber bahan baku olahan	1). Pendampingan teknologi pengolahan ikan berbasis GMP (good manupactoring product), 2). Kemitraan	1). Pendampingan teknologi penanganan limbah yang zero wish, 2). Rantai dingin penanganan bahan baku	1). Diversifikasi produk olahan ikan, 2). Fasilitasi P.IRT	1). Market share produk UPI ke pasar modern, 2). Penguatan permodalan usaha	1). Pameran produk perikanan, 2). Sertifikasi produk pangan berbahan baku ikan
<u>Sasaran</u> : Meningkatkan daya saing produk olahan	<u>Indikator</u> : <u>Sasaran</u> : Prosentase UPI ber-							



hasil perikanan	SKP		ikan 3). Identifikasi tata niaga hasil perikanan	pensuplay bahan baku dengan UPI (unit Pengolah Ikan)				
<p><u>Tujuan</u> : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan</p> <p><u>Sasaran</u> : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan</p>	<p><u>Indikator Tujuan</u> : Nilai SAKIP</p> <p><u>Indikator Sasaran</u> : Nilai LKjIP</p>	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	Menguatkan SAKIP dan RB	Menguatkan SAKIP dan RB	Menguatkan SAKIP dan RB	Menguatkan SAKIP dan RB	Menguatkan SAKIP dan RB	Menguatkan SAKIP dan RB



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Program

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh perangkat daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah *Focus Group Discussion* (FGD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional.

Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana.

Sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan secara terpadu dan sinergis, dimana pemerintah pusat telah menetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas atau Nawa Cita yang wajib dijabarkan oleh pemerintah daerah yaitu:

- a. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada warga negara.
- b. Akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- c. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.
- f. Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.



- g. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Akan melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Keterkaitan tema dan prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, memperhatikan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkembang pada pelaksanaan Musrenbang, maka ditetapkanlah tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Tabanan.

Program kerja operasional Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program kerja pada Dinas Perikanan telah disinergiskan dengan program kerja pusat, provinsi, daerah khususnya program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Asta Program yang mana Dinas Perikanan sebagai unit teknis di Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pembangunan urusan kelautan dan perikanan mengacu pada asta program prioritas pemerintah Kabupaten Tabanan tersebut. Adapun asta program tersebut yaitu:

- a. Pembangunan Berbasis Riset Dan Inovasi Daerah
- b. Data Desa Presisi
- c. Reformasi Birokrasi
- d. Pembangunan Rohani Dan Jasmani Yang Sehat Dan Kuat
- e. Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial
- f. Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan
- g. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
- h. Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal



Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 ada 4 program prioritas dan 1 program mendukung. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan direcofusing karena kewenangan lebih fokus di provinsi. Adapun 4 program tersebut yaitu :

- a. Pengelolaan perikanan budidaya
- b. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- c. Pengelolaan perikanan tangkap
- d. Penunjang urusan pemerintahan daerah

Indikator kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan sebagai dukungan atas rencana pencapaian indikator kinerja sasaran. IKP di Dinas Perikanan sudah dirumuskan oleh aparatur agar lebih terukur dan mencerminkan kinerja instansi.

## 6.2 Kegiatan

Kegiatan prioritas pembangunan yang berkelanjutan di daerah sudah disinergiskan dengan program daerah sehingga hasil (*outcome*) akan dapat diukur dari keluaran (*output*) kegiatan. Sesuai dengan kajian teknis kegiatan dan kajian Kepmendagri 050 tahun 2021 maka ada 2 kegiatan yang direcofusing pada revisi Renstra mulai TA 2023 yaitu:

- a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Dasar refofusing adalah indikator sub kegiatannya berupa rekomendasi ijin yang bukan menjadi kewenangan kabupaten.
- b. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Dasar refofusing adalah indikator sub kegiatannya berupa rekomendasi kapal yang bukan menjadi kewenangan kabupaten atau kewenangan provinsi.

Recofusing kegiatan dan sub kegiatan telah disinkronisasikan sehingga penjabarannya selaras nantinya pada renja perangkat daerah. Berikut sinkronisasi program dan kegiatan dalam perencanaan kinerja seperti berikut ini:

Tabel 6. 1 Program dan Kegiatan



No	Program	No	Kegiatan	Keterangan
1	Program pengelolaan perikanan budidaya	1.1	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Recofusing
		1.2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-
		1.3	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-
2	Program pengelolaan perikanan tangkap	2.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	-
		2.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-
		2.3	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Recofusing
3	Program Pengolaan dan pemasaran hasil perikanan	3.1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-
		3.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-
		3.3	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	-
4	Progam penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
		4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-
		4.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-
		4.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
		4.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-



		4.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-
--	--	-----	--	---

### 6.3 Kegiatan dan Kelompok Sasaran

Rencana pembangunan daerah dilaksanakan melalui program dan kegiatan prioritas. Kegiatan prioritas yang direncanakan dalam pembangunan perikanan dan kelautan periode 2021-2026 merupakan penjabaran teknis RPJMD terintegrasi dengan PPNSB dan Renstra PD. Dinas Perikanan dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan ini merancang integrasi kegiatan dengan kelompok sarasannya sehingga rencana pembangunan dapat lebih fokus. Adapun kelompok sarasannya disajikan seperti di bawah ini:

Tabel 6. 2 Rencana Kegiatan dan Kelompok Sasaran

No	Program	No	Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	Program pengelolaan perikanan budidaya	1.1	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Recofusing
		1.2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	BBI, UPR
		1.3	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	BBI
2	Program pengelolaan perikanan tangkap	2.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	KUB nelayan
		2.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku usaha masyarakat pesisir
		2.3	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Recofusing



3	Program Pengolaan dan pemasaran hasil perikanan	3.1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	UPI, UKM, poklhasar
		3.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Masyarakat, UKM, pengolah, pemasar,
		3.3	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	UPI, UKM, poklhasar
4	Progam penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	4.1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Aparatur
		4.2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Aparatur
		4.3	Administrasi umum perangkat daerah	Aparatur
		4.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Aparatur
		4.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aparatur
		4.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aparatur

#### 6.4 Pendanaan Indikatif

Sinergisitas pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pendanaan pembangunan ditempuh dengan integrasi pembangunan baik yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan APBD, dibiayai oleh lembaga lainnya (swasta dan investor), maupun swadaya masyarakat. Data disajikan seperti berikut ini:



Tabel 6. 3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Awal RPJMD	Tarket Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun ke-										Kondisi Akhir RPJMD		Unit	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		Tar get	Rp juta			
						Tar get	Rp juta	Tar get	Rp juta	Tar get	Rp juta	Tar get	Rp juta	Tar get	Rp juta					
Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat	Meningkatnya produksi perikanan	I	Program Pengelolaan perikanan budidaya	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	0,1	0,2	915.0	0,4	239.0	0,6	272.0	0,8	300.0	1,0	350	1,1	380.0	Diskasn	Kab Tabanan	
		I.1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil yang produktif diterbitkan setahun	0.0	95.0	357	100.0	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recof using	Kab Tabanan
		a	SK: Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0.0	95	37	100	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recof using	
		I.2	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan produktif terbina (klp)	194.0	206.0	142.0	216.0	150.0	72	167	76	175	80	185	84	245	Diskasn	Kab Tabanan	
		a	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudigaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	30	33	142	35	150	37	167	39	175	41	185	43	195			
		b	SK : Pelaksanaan Fasilitasi	Jumlah kelompok pembudidaya ikan	0	0	0	0	0	35	35	37	38	39	40	41	50			



			Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan (klp)															
	1.3		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kaji terap teknologi produktif dihasilkan setahun	1	1	416	1	110	1	135	1	157	1	190	1	215	Diska n	Kab Tabana n
	a		SK: Penyediaan prasarana pembudiaya ikan dalam 1 (satu) arah kabupaten/kota	Jumlah prasarana pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	2	416	2	50	2	70	2	87	2	120	2	135		
	b		SK : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	2	2	0	2	60	2	65	2	70	2	75	2	80	Diska n	
	II		Program pengelolaan perikanan tangkap	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	1,0	1,1	583	1,2	25	1,3	30	1,4	35	1,5	40	1,6	45	Diska n	Kab Tabana n
	2.1		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	Jumlah produksi perikanan tangkap di perairan umum setahun	126.0	127. 1	577	130.4	15	134. 1	18	138. 1	20	142, 2	25	151	28	Diska n	Kab Tabana n
	a		SK: Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah jenis sarana perikanan tangkap ramah lingkungan	3	3	577	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	Recof using	



			disediakan															
	b	SK : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	0	0	0	0	0	3	180	3	200	3	205	4	208		
	2.2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB nelayan terbina produktif setahun	77	78	5	79	5	80	6	81	7	82	7	83	8	Diska n	Kab Tabana n
	a	SK: Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	3	3	5	3	5	3	6	4	7	4	7	4	8		
	b	SK : Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan kelembagaanya (klp)	1	1	6	1	6	1	6	1	6	1	7	1	8		
	2.3	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah armada tangkap nelayan yang sudah diterbitkan tanda daftar kapal perikanan skala kecil	0.0	-	0	75.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Recof using	Kab Tabana n
	a	SK: Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal	Jumlah armada nelayan skala kecil yang terlayani	0	0	0	75	5	-	-	-	-	-	-	-	-	Recof using	



			Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	pendaftaran armada tangkapnya															
Meningkatnya daya saing produk olahan hasil perikanan	III		Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan (%)	0,8	0,9	470	1,0	500	1,1	505	1,2	555	1,3	650	1,4	690	Disk n	Kab Tabana n
	3.1		Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis ikan sebagai bahan baku olahan produk bernilai tambah dimanfaatkan	4.0	5	360	6	375	7	375	8	395	9	430	10	450	Diska n	Kab Tabana n
	a		SK:Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis ikan sebagai bahan baku olahan produk bernilai tambah dimanfaatkan	4.0	5	360	6	375	7	375	8	395	9	430	10	450	Diska n	
	3.2		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	umlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)	14	15	360	16	375	17	375	19	395	21	430	23	450		Kab Tabana n
	a		SK: Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklarsar produkif terbina	60	63	65	65	70	68	70	70	85	73	120	74	130	Diska n	



		3.3	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko (unit usaha)	60	62	65	63	70	65	70	67	85	69	120	71	130		Kab Tabanan	
		a	SK: Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah poklarsar yang dapat difasilitasi pendaftaran usaha pengolahan hasil perikanan setahun	1.0	1	45	1	55	1	60	1	75	1	100	1	110	Disk n		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	Meningkatkannya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	IV	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase layanan menunjang tugas pokok dan fungsi PD (%)	100	100	6.25 6,9	100	6.25 6,9	100	6.25 6,9	100	6.83 8,7	100	7.036,7	100	7.236, 7	Diska n	Kab Tabanan	
		4.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	4	3	4	3.5	4	4	4	4	4	5	4	5.5	Diska n	Kab Tabanan	
		a	SK: Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (laporan)	2	4	4	4	2.5	4	3	4	4	4	4	4	4	4.5		
		b	SK: Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan	12	12	5.29 4,9	12	5.25 7,9	12	5.26 7,9	12	5.83 1,7	12	6.011,7	12	6.193, 7			



			diberikan setahun															
	4.2	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang)	42	41	5442,9	40	5434,9	39	5482,9	39	5502,7	40	5522,7	41	5542,7	Diska n	Kab Tabana n
	a	SK: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD (laporan)	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5		
	b	Koordinasi dan SK: Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan dihasilkan setahun	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5		
	4.3	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah jenis layanan perangkat daerah diberikan setahun	4.0	4.0	92	4.0	93	4.0	96	4.0	98	4.0	100.0	4.0	102.0	Diska n	Kab Tabana n
	a	SK: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	1	1	2	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3		
	b	SK: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)	1	1	3	1	3	1	3	1	4	1	4	1	5		
	c	SK: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1	1	27	1	27	1	28	1	29	1	29	1	29		



	d	SK: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	2	2	7	2	7	2	8	2	9	2	9	2	10		
	e	SK: Penyediaan bahan material	Jumlah paket mahan/material yang disediakan (paket)	1	1	19	1	19	1	19	1	20	1	21	1	21		
	f	SK: Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (laporan)	1	1	33	1	33	1	34	1	34	1	35	1	35		
	4.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis BMD disediakan menunjang operasional dinas	3	3	50	3	52	3	56	3	59	3	62	3	65	Diska n	Kab Tabana n
	a	SK: Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3	3	50	3	52	2	56	2	59	2	62	2	65		
	4.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kinerja pelayanan dinas	6.0	6.0	700	6.0	701	6.0	710	6.0	720	6.0	730.0	6.0	740.0	Diska n	Kab Tabana n
	a	SK: Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	1	1	4	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8		
	b	SK: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan Listrik ydang Disediakan (laporan)	3	3	48	3	48	3	50	3	55	3	59	3	64		
	c	SK: Penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah laporan penyediaan jasa	1	1	648	1	649	1	655	1	660	1	665	1	670		



		kantor	pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)															
	4.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD terpeliharaan menunjang operasional dinas	1	1	116	1	117	1	120	1	122	1	124	1	126	Diska n	Kab Tabana n
	a	SK: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaran dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	5	5	78	5	78	5	79	5	79	5	80	5	80		
	b	SK: Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	4	4	33	10	34	10	35	10	36	10	37	10	38		
	c	SK: Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	1	5	1	5	1	6	1	7	1	7	1	8		

Sumber: Renstra Diskan, 2021-2026



## BAB VII

### KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk member gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) di masing-masing perangkat daerah. Adapun tolok ukur kinerja utama perangkat daerah pada Dinas Perikanan ada dua sasaran utama yaitu:

a. Meningkatnya produksi perikanan

Tolok ukur ini dijadikan tolok ukur kinerja utama Dinas Perikanan dalam membangun agribisnis perikanan dalam menghasilkan pangan hewani dari ikan yang dihasilkan dari hulu yaitu hasil produksi perikanan budidaya di kolam, sawah/ penyelang, saluran irigasi/ kolam deras, dan keramba jarring apung. Dari tengah (agroindustri) yaitu produksi olahan hasil perikanan dengan produk bernilai tambah yang dihasilkan untuk meningkatkan daya saing produk. Dari hilir (pemasaran) yaitu tata niaga pemasaran perikanan baik itu produk ikan hidup, ikan segar, dan aneka olahan hasil perikanan.

b. Meningkatnya daya saing produk perikanan

Tolok ukur ini dijadikan tolok ukur kinerja utama Dinas Perikanan dalam meningkatkan daya saing produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh UPI, UKM, poklhasar binaan dinas melalui peningkatan SKP usahanya. Adapun target indikator kinerja utama disajikan seperti tabel berikut ini:

Tabel 7. 1 IKU Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator	Definisi operasioanal	Kondisi awal	Target Kinerja Tahun ke-						Sat uan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya produksi perikanan	Prosentase peningkatan produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap tahun ke N dikurangi Jumlah produksi perikanan	3,850.9 ton	0,35	0,55	0,75	0,95	1,10	1,20	%



		budidaya dan perikanan tangkap tahun ke N-1 dibagi Jumlah produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap tahun ke N-1 dikalikan 100%								
Meningkatnya daya saing produk olahan hasil perikanan	Prosentase UPI yang ber-SKP	Jumlah UPI ber-SKP dibagi dengan UPI keseluruhan dikalikan 100%	0	1,6	3,1	4,6	6,0	7,4	10,2	%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	Nilai LKjIP	Reviu pihak eksternal	80,7	80	80,5	81,0	81,5	82,0	82,5	A

## 7.2 Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah (IKD) yang tertuang pada RPDMD Semesta Berencana bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja utama daerah yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana telah ditetapkan 41 indikator, dimana indikator nomor 41 adalah urusan kelautan dan perikanan yang menjadi tanggung jawab dinas teknis untuk mencapainya. Adapun Indikator Kinerja Utama Daerah tersebut seperti berikut ini:



Tabel 7. 2 IKU Daerah

No	Aspek/ Urusan	Indikator	Awal RPJMD	Target Kinerja/ Tahun					
				2021	2022	2023	2004	2025	2026
41	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	Tingkat produksi ikan (ton)	3,850.9	3,864.1	3,886.5	3,916.0	3,953.8	3,997.1	4,045.1

### 7.3 Indikator Kinerja Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sistem AKIP untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assesment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara penyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ditentukan oleh pihak lain.

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan aspek daya saing daerah dapat dilihat pada RPJMD Semesta Berencana dan disajikan tabel berikut ini:



Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Daya Saing Daerah

Aspek	Indikator	Existing 2020	Target Kinerja/ Tahun					
			2021	2022	2023	2004	2025	2026
Daya saing daerah	Produksi Perikanan (ton)	3,850.9	3,864.1	3,886.5	3,916.0	3,953.8	3,997.1	4,045.1
	Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	31.4	32.0	32.3	32.5	32.9	33.4	33.8
	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	89	90	92	94	96	98	100
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	16.4	16.5	16.5	16.6	16.6	16.7	16.7
	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman (ton)	630.6	636.5	643.2	650.3	658.1	667.5	674.8
	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial (%)	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
	Nilai Tukar Nelayan	104.0	104.5	105.0	105.5	106.0	106.5	107.0

Sumber : RPJMD SB 2021-2026



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perikanan memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. Renstra Dinas Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi pimpinan daerah sesuai urusan kelautan dan perikanan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan urusan kelautan dan perikanan yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD Kabupaten Tabanan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah untuk dilaksanakan secara konsisten.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dimana Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021- 2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta masyarakat termasuk dunia usaha.

Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan urusan kelautan dan perikanan setiap tahunnya. Pimpinan Perangkat Daerahi berkewajiban menyebarluaskan RPJMD Semesta Berencana dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 kepada seluruh stakeholder.

Penyusunan Rencana Strategis ini adalah dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis dan prioritas, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rencana Strategis ini.

Jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan sangat berkomitmen dalam sinergisitas perencanaan pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten sehingga



diharapkan dokumen perencanaan jangka menengah ini dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Sebagai komitmen bersama, maka semua komponen harus memahami, mematuhi dan juga harus dilandasi dengan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran dan keinginan kuat untuk maju serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan terpadu, maka kami meyakini tujuan pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tabanan dapat tercapai.

Tabanan, 27 Juli 2022

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Tabanan



IMADE YUDIANA,ST.,M.T

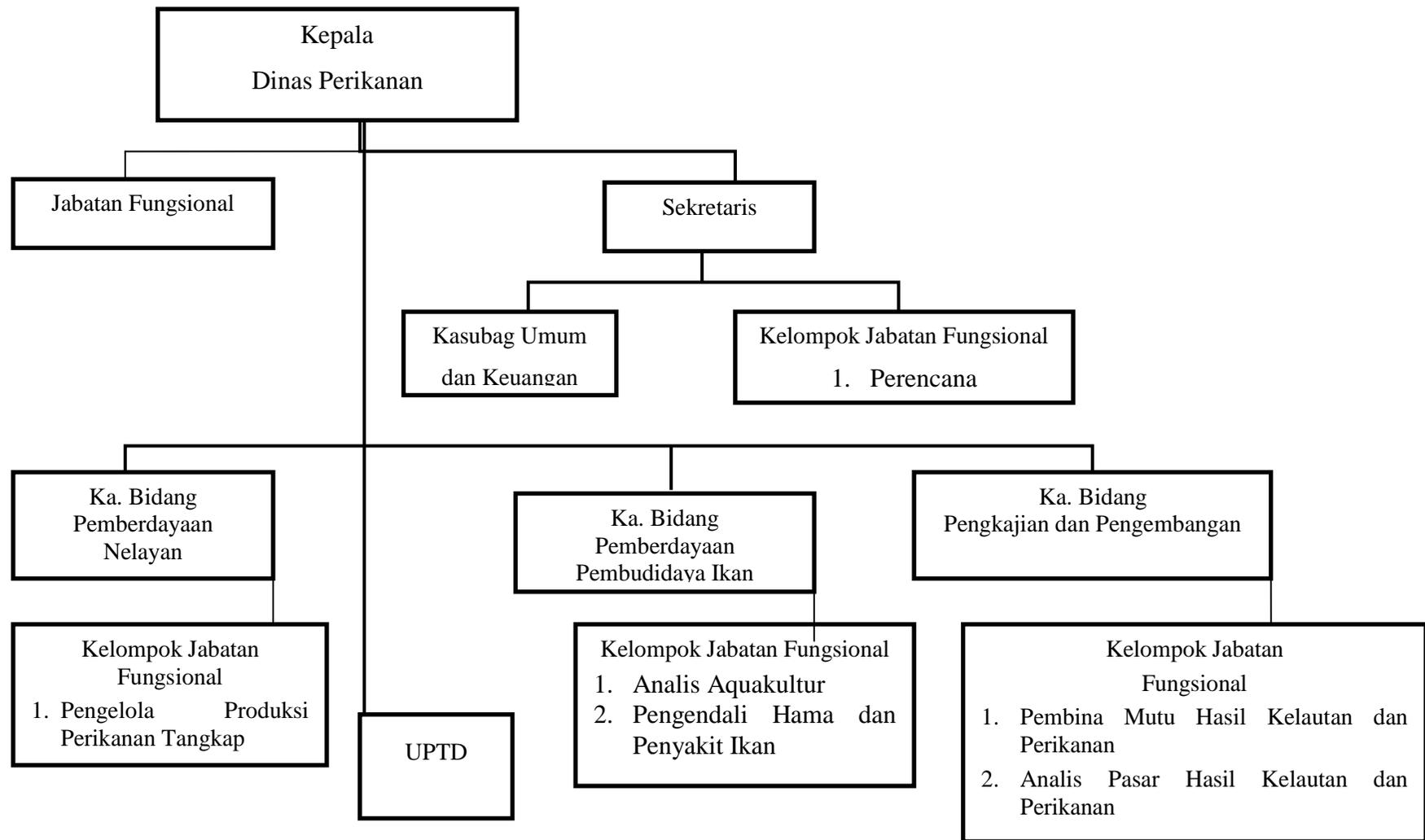
Pembina Utama Muda

NIP. 19690619 199803 1 005



Lampiran II.1

Struktur Organisasi







			Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)																
		2.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KUB nelayan terbina produktif setahun	77	78	5	79	7	80	15	81	20	82	25	83	30	Diskasn	Kab Tabanan
		2.3	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah armada tangkap nelayan yang sudah diterbitkan tanda daftar kapal perikanan skala kecil	0.0	-	5.0	75.0	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Recof using	Kab Tabanan
		III	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Prosentase desa yang memiliki pokmaswas produktif (%)	8,3	8,3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recof using	Kab Tabanan
		3.1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi perikanan air tawar yang terawasi stock biota perairan setahun	3	3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recof using	Kab Tabanan
Meningkatnya daya saing produk	IV		Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan (%)	0,8	0,9	470	1,0	370	1,1	495	1,2	505	1,3	520	1,4	530	Diskasn	Kab Tabanan



	olahan hasil perikanan	4.1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis ikan sebagai bahan baku olahan produk bernilai tambah dimanfaatkan	4.0	5	360	6	350	7	365	8	365	9	370	10	370	Diska n	Kab Tabana n
		4.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklarsar produkif terbina	60	63	65	65	70	68	75	70	80	73	85	74	90	Diska n	Kab Tabana n
		4.3	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah poklarsar yang dapat difasilitasi pendaftaran usaha pengolahan hasil perikanan setahun	1.0	1	45	1	50	1	55	1	60	1	65	1	70	Diska n	Kab Tabana n
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	Meningkatkannya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	V	Progam penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase layanan menunjang tugas pokok dan fungsi PD (%)	100	100	6414	100	6443	100	6481	100	6519	100	6557	100	6595	Diska n	Kab Tabana n
		51	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen SAKIP dihasilkan setahun	4.0	4	5	4	6	4	7	4	8	4	9	4	10	Diska n	Kab Tabana n
		5.2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan diberikan setahun	12	12	5452	12	5444	12	5492	12	5512	12	5532.0	12	5552.0	Diska n	Kab Tabana n
		5.3	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah jenis layanan perangkat daerah diberikan setahun	4.0	4.0	92	4.0	93	4.0	96	4.0	98	4.0	100.0	4.0	102.0	Diska n	Kab Tabana n
		5.4	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis BMD disediakan	3	3	50	3	52	3	56	3	59	3	62	3	65	Diska n	Kab Tabana



			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	menunjang operasional dinas															n
		5.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kinerja pelayanan dinas	6.0	6.0	699	6.0	700	6.0	710	6.0	720	6.0	730.0	6.0	740.0	Diska n	Kab Tabana n
		5.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD terpeliharaan menunjang operasional dinas	1	1	116	1	117	1	120	1	122	1	124	1	126	Diska n	Kab Tabana n

Sumber : Renstra Dinas Perikanan, 2021-2026



## LAMPIRAN

### **BERITA ACARA REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Rapat Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan, telah diselenggarakan Rapat Revisi Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan perubahan peraturan perencanaan kinerja
2. Pemaparan perubahan peraturan kelembagaan
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta rapat sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan rapat, maka pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022  
Jam : 09.00 WITA - selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perikanan  
Jalan Pulau Nias No 33 Tabanan

#### MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati revisi Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 seperti Lampiran I;
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran I) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan rapat revisi Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026; dan
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai dokumen perencanaan kinerja jangka menengah perangkat daerah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.





		1.3	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kaji terap teknologi produktif dihasilkan setahun	1	1	416	1	58	1	70	1	87	1	120	1	135	Diska n	Kab Tabana n
		a	SK: Penyediaan prasarana pembudiaya ikan dalam 1 (satu) aerah kabupaten/kota	Jumlah jenis sapras budidaya ikan disediakan setahun	2	2	416	2	50	2	70	2	87	2	120	2	135		
		b	SK : Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis lingkungan perikanan yang dijaga	4	5	0	5	60	5	65	5	70	5	75	5	80		
		II	Program pengelolaan perikanan tangkap	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	1,0	1,1	583	1,2	25	1,3	30	1,4	35	1,5	40	1,6	45	Diska n	Kab Tabana n
		2.1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)	Jumlah produksi perikanan tangkap di perairan umum setahun	126.0	127.1	577	130.4	15	134.1	18	138.1	20	142,2	25	151	28	Diska n	Kab Tabana n
		a	SK: Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah jenis sarana perikanan tangkap ramah lingkungan disediakan	3	3	577	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	Recof using	
		b	SK : Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	0	0	0	0	0	3	180	3	200	3	205	4	208		
		2.2	Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah KUB nelayan terbina	77	78	5	79	5	80	6	81	7	82	7	83	8	Diska n	Kab Tabana



			Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	produktif setahun														n
	a	SK: Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan dan penggarap yang memanfaatkan modal usaha dari LK terbina	3	3	5	3	5	3	6	4	6	4	7	4	8		
	b	SK : Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan kelembagaanya (klp)	1	1	6	1	6	1	6	1	6	1	7	1	8		
	2.3	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah armada tangkap nelayan yang sudah diterbitkan tanda daftar kapal perikanan skala kecil	0.0	-	0	75.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	Recof using	Kab Tabanan
	a	SK: Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah armada nelayan skala kecil yang terlayani pendaftaran armada tangkapnya	0	0	0	75	5	-	-	-	-	-	-	-	-	Recof using	
	III	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Prosentase desa yang memiliki pokmaswas produktif (%)	8,3	8,3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recof using	Kab Tabanan
	3.1	Kegiatan Pengawasan Sumber	Jumlah lokasi perikanan air	3	3	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recof using	Kab Tabanan



			Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	tawar yang terawasi stok biota perairan setahun														n	
	a		SK: Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang melaksanakan penumbuhan stok biota perikanan	32	32	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Recof using	
Meningkatkannya daya saing produk olahan hasil perikanan	IV		Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Prosentase peningkatan produksi produk olahan hasil perikanan (%)	0,8	0,9	470	1,0	500	1,1	505	1,2	555	1,3	650	1,4	690	Diskasn	Kab Tabanan
	4.1		Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis ikan sebagai bahan baku olahan produk bernilai tambah dimanfaatkan	4.0	5	360	6	375	7	375	8	395	9	430	10	450	Diskasn	Kab Tabanan
	a		SK:Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis ikan yang disosialisasikan untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat	4	4	360	4	375	4	375	4	395	4	430	5	450		
	4.2		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan	Jumlah poklhasr produkif terbina	60	63	65	65	70	68	70	70	85	73	120	74	130	Diskasn	Kab Tabana



			Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil															n	
		a	SK: Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah jenis ikan sebagai bahan baku produk bernilai tambah dimanfaatkan	7	7	65	7	70	7	70	7	85	7	120	8	130		
		4.3	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah poklhasr yang dapat difasilitasi pendaftaran usaha pengolahan hasil perikanan setahun	1.0	1	45	1	55	1	60	1	75	1	100	1	110	Diska n	Kab Tabana n
		a	SK: Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah database kelompok perikanan yang terupdate setiap tahun	1	1	45	1	55	1	60	1	75	1	100	1	110		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	Meningkatkannya akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan	V	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Prosentase layanan menunjang tugas pokok dan fungsi PD (%)	100	100	6.25 6,9	100	6.25 6,9	100	6.25 6,9	100	6.83 8,7	100	7.036,7	100	7.236,7	Diska n	Kab Tabana n
		5.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen SAKIP dihasilkan setahun	4.0	4	5	4	6	4	7	4	8	4	9	4	10	Diska n	Kab Tabana n
		a	SK: Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	3	2	3.5	4	4	4	4	4	5	4	5.5		
		b	SK: Evaluasi kinerja	Jumlah Laporan	2	2	2	2	2.5	4	3	4	4	4	4	4	4.5		



			Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		5.2	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan diberikan setahun	12	12	5.294,9	12	5.257,9	12	5.267,9	12	5.831,7	12	6.011,7	12	6.193,7	Disk n	Kab Tabana n
		a	SK: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	41	5442,9	40	5434,9	39	5482,9	39	5502,7	40	5522,7	41	5542,7		
		b	Koordinasi dan SK: Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5		
		5.3	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah jenis layanan perangkat daerah diberikan setahun	4.0	4.0	92	4.0	93	4.0	96	4.0	98	4.0	100.0	4.0	102.0	Diska n	Kab Tabana n
		a	SK: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	1	2	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3		
		b	SK: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang	1	1	3	1	3	1	3	1	4	1	4	1	5		



			disediakan															
	c	SK: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	1	27	1	27	1	28	1	29	1	29	1	29		
	d	SK: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang letakan dan penggandaan yang disediakan	2	2	7	2	7	2	8	2	9	2	9	2	10		
	e	SK: Penyediaan bahan material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1	1	19	1	19	1	19	1	20	1	21	1	21		
	f	SK: Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	1	33	1	33	1	34	1	34	1	35	1	35		
	5.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis BMD disediakan menunjang operasional dinas	3	2	50	2	52	2	56	2	59	2	62	2	65	Diska n	Kab Tabana n
	a	SK: Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	2	50	2	52	2	56	2	59	2	62	2	65		
	5.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kinerja pelayanan dinas	6.0	6.0	700	6.0	701	6.0	710	6.0	720	6.0	730.0	6.0	740.0	Diska n	Kab Tabana n
	a	SK: Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	1	4	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8		
	b	SK: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	jumlah rekening terbayar setahun	3	3	48	3	48	3	50	3	55	3	59	3	64		



		Daya Air dan Listrik																
c	SK: Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah layanan administrasi keuangan bagi tenaga non PNS ddbayarkan setahun	12	12	648	12	649	12	655	12	660	12	665	12	670			
5.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis BMD terpeliharaan menunjang operasional dinas	1	1	116	1	117	1	120	1	122	1	124	1	126	Diska n	Kab Tabana n	
a	SK: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, dan perijinan kendaran dinas operasional atau lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas terpelihara setahun (jenis)	5	5	78	5	78	5	79	5	79	5	80	5	80			
b	SK: Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan kerja layak operasional (jenis)	4	4	33	4	34	4	35	4	36	4	37	4	38			
c	SK: Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara setahun (jenis)	1	1	5	1	5	1	6	1	7	1	7	1	8			


  
 Kepala Dinas Perikanan  
 Kabupaten Tabanan


  
**I MADE YUDIANA, ST., M.T**  
 Pembina Utama Muda



*Renstra Dinas Perikanan*

NIP. 19690619 199803 1 005